



RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

PROVINSI RIAU 2014 - 2019



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2018**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah-Nya sehingga Perubahan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2014-2019 dapat diselesaikan, sehingga dapat menjadi acuan arah pembangunan peternakan di masa yang akan datang.

Renstra ini berisikan tentang gambaran kinerja masa lalu, apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya dalam periode lima tahun ke depan sebagaimana secara teknis telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Perubahan Renstra ini mengacu pada Perubahan RPJMD Provinsi Riau. Dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2014-2019 ini diyakini masih banyak memiliki kekurangan, kelemahan dan keterbatasan. Untuk itu besar harapan kami kepada semua pembaca kiranya dapat memberikan masukan, kritikan maupun saran yang bersifat membangun akan menjadi masukan bagi perbaikan proses pembuatan Rencana Strategis di masa yang akandatang, sehingga Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun mendatang akan lebih baik dan sempurna.

Pekanbaru, Februari 2018

KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU

drh. ASKARDIYA R. PATRIANOV, MP

Pembina Utama Madya
NIP. 19591117 198303 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan peternakan merupakan bagian dari pembangunan nasional dan daerah. Sejak dulu hingga sekarang sektor peternakan memegang peran yang sangat strategis dalam perekonomian nasional dan daerah. Peran strategis tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui penyediaan bahan pangan, penyediaan bahan baku industri, pakan, bio-energi, penyerapan tenaga kerja, pencapaian PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), sumber devisa negara, sumber pendapatan bagi sebagian besar masyarakat pedesaan, dan pelestarian lingkungan. Peran ini akan bertambah di masa yang akan datang dengan berkembangnya teknologi dan berkurangnya sumberdaya tak terbarukan, terutama dalam hal penyediaan pangan dan sumber energi alternatif.

Sub sektor peternakan di Provinsi Riau masih belum mampu menopang semua peran tersebut secara maksimal. Pendapatan peternak sebagai pelaku terdepan masih sangat rendah karena sebagian besar usaha mereka berskala kecil, keterbatasan modal, teknologi yang digunakan sederhana, dan akses pembiayaan. Akibatnya produktivitas masih relatif rendah, kualitas komoditas belum mampu bersaing, dan harga pokok produksi masih tinggi. Situasi yang demikian akan menyulitkan mereka untuk bersaing dengan komoditas yang dihasilkan dari luar Provinsi Riau.

Dalam situasi dan kondisi seperti ini, pembangunan peternakan masih tetap penting untuk dilanjutkan secara berkesinambungan dalam rangka pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan adalah: 1) potensi sumber daya yang besar dan beragam, 2) banyaknya penduduk yang bergantung pada sub sektor ini, 3) peluang pasar yang sangat terbuka, dan 4) berpotensi besar dalam memberikan kontribusi PDRB.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas diperlukan perencanaan pembangunan sub sektor peternakan yang terarah, terpadu, dan bersinergi antar sub sektor/sektor terkait, dengan tetap mempedomani dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional/Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah, dan Rencana Strategis Kementerian Pertanian sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) maka telah disusun Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Provinsi Riau Tahun 2014-2019. Dalam perjalannya, terjadi perubahan RPJMD Provinsi Riau. Untuk itu dilakukan perubahan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2014-2019.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2014–2019, peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan hukum sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- 2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Anggaran Perangkat Daerah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 12) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau;
- 13) Peraturan Gubernur Riau Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Revisi Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019, yaitu:

- a) Menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pada sub sektor peternakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dan disesuaikan dengan perkembangan terbaru program dan target kegiatan;
- b) Merupakan dokumen perencanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam mendukung Pembangunan Daerah Provinsi Riau;
- c) Mempermudah pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi peternakan;

1.3.2. Tujuan

- a) Mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2014 -2019;
- b) Menentukan arah dan menjadi acuan dalam melaksanakan rencana pembangunan peternakan di Provinsi Riau;

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2014–2019 disusun menurut sistematika berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi penjelasan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN

Bab ini memuat informasi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas mengenai sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, sumberdaya OPD, kinerja pelayanan dan mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, dan mengulas tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Pada bab ini diulas tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan dinas, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan renstra Kementerian Pertanian dan renstra dinas, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat penjelasan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dijelaskan tentang rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan lima tahun mendatang. Penjelasan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD dengan kebijakan perangkat daerah.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan tentang indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau yang ditetapkan pada tanggal 4 November 2016 dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Unit kerja yang terdapat pada Dinas Peternakan Provinsi Riau memiliki 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang, dan ditunjang oleh 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis (UPT). Bidang-bidang dimaksud, yaitu:

- 1) Bidang Produksi Peternakan;
- 2) Bidang Agribisnis Peternakan;
- 3) Bidang Kesehatan Hewan;
- 4) Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner;

Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdapat pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, yaitu:

- 1) UPT Rumah Sakit Hewam
- 2) UPT Inseminasi Buatan Ternak
- 3) UPT Laboratorium Pakan Ternak

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang peternakan serta dapat ditugaskan melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Masing-masing unit kerja tersebut di atas mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan otonomi daerah di bidang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan melaksanakan tugas manajerial dan teknis pada Sekretariat, Bidang Produksi Ternak, Bidang Agribisnis Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Unit Pelaksana Teknis dan Jabatan Fungsional;

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi;

- a. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- b. Menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan Perencanaan Program, Keuangan dan Perlengkapan, pengelolaan barang milik daerah, Kepegawaian dan Umum meliputi ketatausahaan, pengelolaan data dan informasi, organisasi ketatalaksanaan, kehumasan, hukum, evaluasi dan pelaporan, serta koordinasi pelaksanaan tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;
- b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;

- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada kepala Dinas;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Produksi Peternakan

Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Produksi Peternakan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Budidaya Ternak, Seksi Perbibitan Ternak dan Seksi Pakan.

Untuk melaksanakan tugas nya Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Produksi Peternakan;
- b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Produksi Peternakan;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada kepala Dinas;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Agribisnis Peternakan

Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Agribisnis Peternakan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Sumber Daya dan Kelembagaan Peternakan, Seksi Pengembangan Kawasan Peternakan dan Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Pengembangan Usaha Peternakan.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Agribisnis Peternakan;
- b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Agribisnis Peternakan;

- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada kepala Dinas;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

5. Bidang Kesehatan Hewan

Bidang Kesehatan Hewan dan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Pengamatan Penyakit Hewan, Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan serta Seksi Kelembagaan, Sumber Daya Kesehatan Hewan dan Pengawasan Obat Hewan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Kesehatan Hewan;
- b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Kesehatan Hewan;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada kepala Dinas;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

6. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner

Bidang Kesehatan Hewan dan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Hygiene Sanitasi, Seksi Pengawasan Keamanan Produk Hewan serta Seksi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner;

- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada kepala Dinas;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

7. UPT Rumah Sakit Hewan

UPT Rumah Sakit Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di bidang Rumah Sakit Hewan.

Untuk melaksanakan tugas, UPT Rumah Sakit Hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Laboratorium Veteriner dan Seksi Pelayanan Medik Veteriner;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Laboratorium Veteriner dan Seksi Pelayanan Medik Veteriner;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Laboratorium Veteriner dan Seksi Pelayanan Medik Veteriner; dan
- d. Penyelenggaraan pelayanan publik terhadap diagnostik dan layanan medik veteriner baik secara pasif maupun aktif.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

8. UPT Inseminasi Buatan Ternak

UPT Inseminasi Buatan Ternak mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di bidang Inseminasi Buatan Ternak.

Untuk melaksanakan tugas, UPT Inseminasi Buatan Ternak menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha Seksi Pemeliharaan Pejantan Unggul, Perbibitan Ternak dan Pemeliharaan Hijauan Pakan Ternak dan Seksi Produksi, Distribusi dan Pemasaran Semen Beku;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pemeliharaan Pejantan Unggul, Perbibitan Ternak dan Pemeliharaan Hijauan Pakan Ternak dan Seksi Produksi, Distribusi dan Pemasaran Semen Beku;

- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pemeliharaan Pejantan Unggul, Perbibitan Ternak dan Pemeliharaan Hijauan Pakan Ternak dan Seksi Produksi, Distribusi dan Pemasaran Semen Beku;
- d. Penyelenggaraan pelayanan publik terhadap Inseminasi Buatan Ternak; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

9. UPT Laboratorium Pakan Ternak

UPT Laboratorium Pakan Ternak mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di bidang Laboratorium Pakan Ternak.

Untuk melaksanakan tugas, Laboratorium Pakan Ternak menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Ternak dan Seksi Pembibitan Hijauan Pakan Ternak dan Pengujian Pakan Ternak;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Ternak dan Seksi Pembibitan Hijauan Pakan Ternak dan Pengujian Pakan Ternak;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Ternak dan Seksi Pembibitan Hijauan Pakan Ternak dan Pengujian Pakan Ternak;
- d. Penyelenggaraan pelayanan penyediaan bibit/benih hijauan pakan ternak dan ternak serta pendampingan teknologi pakan ternak; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

2.1.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi dapat dilihat pada Lampiran 1.

2.2. Sumber Daya Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Dalam mendukung tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh masing-masing unit kerja pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, maka telah ditempatkan para petugas dengan uraian sebagai berikut :

Tabel II-1. Data Pegawai Lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

NO	UNIT KERJA DINAS	JUMLAH APARATUR				JUMLAH
		STRUKTURAL	FUNGSIONAL UMUM	FUNGSIONAL TERTENTU	HONORER /THL	
1	Kepala Dinas/ Sekretariat/Bidang	20	39	5	61	125
2	UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan	4	2	5	17	28
3	UPT Inseminasi Buatan Daerah	4	3	1	22	30
4	UPT Plaza Ternak	4	6	0	14	24
5	UPT Pembibitan Ternak Dan Pengembangan Hijauan Pakan Ternak (HPT)	4	3	3	48	57
Jumlah		36	53	14	162	265

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

Tabel II-2. Jumlah Pegawai/ Honorer/ THL Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Strata 3	0	0,00
2	Strata 2	38	14,39
3	Strata 1	96	36,36
4	Diploma (1-4)	24	9,09
5	SMA/SMK/MA	89	33,71
6	SMP/MTs	2	0,38
7	SD	16	6,06
TOTAL		265	100,00

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

2.2.2 Sumber Daya Aset/ Modal

Selain dukungan sumber daya aparatur, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau juga harus didukung oleh sumber daya aset/modal yang memadai. Kondisi aset/modal yang dimiliki saat ini disajikan sebagaimana tabel II-3 berikut ini :

Tabel II-3. Data Aset/Modal pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

No	Jenis Aset	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak/Jelek
1	Gedung kantor	4	4	
A	Aula	3	3	
B	Ruang Rapat	2	2	
2	Laboratorium	1	1	
3	Kendaraan Dinas Jabatan roda 4	5	5	
4	Kendaraan Dinas Operasional roda 4	14	14	
5	Kendaraan operasional Roda 2	27	27	
6	Holding Ground	1	1	
7	Kandang Sapi	14	14	
8	Sapi Bull	17	17	
9	Induk sapi	32	32	
10	Komputer PC	67	50	17
11	Note Book	22	22	
12	Mesin Fotocopy	3	3	

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

Berdasarkan aset yang dimiliki oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau secara umum telah dapat menunjang operasional kegiatan dinas, baik kegiatan fisik maupun non fisik. Namun demikian yang perlu menjadi perhatian dalam menunjang kelancaran operasional kegiatan dinas adalah ketersediaan jumlah kendaraan dinas perlu ditambah, terutama kendaraan roda empat *double cabin for field (four wheel driver)*, mengingat medan yang sering ditempuh dalam pembinaan kegiatan peternakan kebanyakan di pelosok-pelosok desa yang sulit ditempuh dengan kendaraan biasa.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

2.3.1. Perkembangan Pembangunan Peternakan

Pembangunan peternakan memiliki peran yang strategis dalam perekonomian Riau. Peran strategis tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui pembentukan modal; penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bioenergi; penyerap

tenaga kerja; sumber devisa negara; sumber pendapatan; serta pelestarian lingkungan melalui praktek usaha tani yang ramah lingkungan.

Adanya peningkatan jumlah populasi ternak di Provinsi Riau merupakan salah satu tujuan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. Perkembangan populasi ternak tersebut tidak terlepas dari dukungan Pemerintah dalam kegiatan penyebaran ternak dan para peternak yang memelihara ternak tersebut. Berdasarkan data jumlah ternak sapi potong mengalami penambahan sebanyak 42.800 ekor dari tahun 2012 hingga tahun 2016. Ayam ras pedaging mengalami pertambahan populasi sebanyak 8.100.800 ekor. Perkembangan populasi ternak disajikan pada tabel II-4 berikut:

Tabel II-4. Perkembangan Populasi Ternak Tahun 2012 -2016

No	Jenis Ternak	Perkembangan Populasi Ternak (ekor)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Sapi potong	189.060	197.340	217.652	229.634	231.860
2	Sapi perah	228	266	143	140	132
3	Kerbau	41.229	42.383	43.163	39.367	33.855
4	Kambing	208.429	214.707	184.899	195.827	180.671
5	Domba	4.583	4.769	8.242	7.354	9.225
6	Babi	49.873	61.593	47.324	48.033	47.543
7	Ayam Buras	3.377.652	4.390.397	3.327.820	3.746.784	5.372.975
8	Ayam Ras Petelur	134.481	171.033	67.798	65.628	162.285
9	Ayam Ras Pedaging	38.165.987	39.883.405	39.987.136	39.304.056	46.266.787

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

Komoditas ternak yang menjadi fokus pengembangan di Provinsi Riau adalah sapi potong. Penambahan jumlah populasi sapi potong pada tahun 2014 mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan sebanyak 20.312 ekor dari tahun 2013. Sementara pada tahun 2015 penambahan populasi sapi potong mencapai 11.982 ekor, namun pada tahun 2016 penambahan populasi sapi potong hanya 2.226 ekor. Penambahan populasi sapi potong terbanyak terjadi di Kabupaten Siak sebanyak 6.406 ekor. Sedangkan penurunan populasi sapi potong terbanyak terdapat pada Kota Dumai sebanyak 321 ekor. Perkembangan populasi sapi potong per Kabupaten/Kota di Provinsi Riau disajikan pada tabel II-5 berikut:

Tabel II-5. Perkembangan Populasi Ternak Sapi Potong Tahun 2012-2016

No.	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kuantan Singingi	24.896	23.963	22.075	22.248	23.503
2	Indragiri Hulu	34.185	27.813	35.622	39.198	41.388
3	Indragiri Hilir	5.476	4.953	6.330	7.698	7.378
4	Pelalawan	7.548	7.377	9.568	9.674	10.322
5	Siak	16.022	10.446	19.055	20.305	22.133
6	Kampar	27.123	26.563	35.598	40.610	35.691
7	Rokan Hulu	35.795	34.655	42.525	43.197	44.016
8	Bengkalis	11.417	11.205	14.406	15.077	13.203
9	Rokan Hilir	13.521	15.621	18.453	18.167	20.524
10	Kep. Meranti	4.208	3.710	5.003	4.478	3.491
11	Pekanbaru	4.119	4.864	4.612	4.608	5.173
12	Dumai	4.750	4.261	4.405	4.374	5.038
	Jumlah	189.060	175.431	217.652	229.634	231.860

Adanya penambahan populasi ternak tentunya menambah jumlah produksi daging ternak, namun dalam kenyataannya produksi daging ternak saat ini belum dapat mengimbangi pemenuhan kebutuhan konsumsi daging ternak.

Perbandingan produksi dan konsumsi daging dapat dilihat pada Tabel II.6.

Tabel II.6. Rasio Produksi dan Konsumsi Daging Tahun 2014 - 2016

Komoditas	Tahun			Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun
	2014	2015	2016	
Produksi (Ton)	55.912.875	61.411.531	63.225.009	0,06
Konsumsi (Ton)	61.884.420	75.498.384	79.961.943	0,14
Perimbangan (Ton)	(5.971.545)	(14.086.853)	(16.736.934)	0,77
Rasio	0,90	0,81	0,79	0,46

Dari Tabel II.6. dapat dijelaskan bahwa selama periode 2014-2016 menunjukkan terjadinya peningkatan produksi daging di Riau dari 55.912.875 ton pada tahun 2014 menjadi 63.225.009 ton pada tahun 2016 atau tumbuh rata-rata 6,39% per tahun. Sementara konsumsi daging juga mengalami kenaikan rata-rata sebesar 13,96% per tahun. Kenaikan pertumbuhan produksi daging tidak sebanding dengan kenaikan pertumbuhan konsumsi yang mengakibatkan semakin besarnya defisit pemenuhan kebutuhan konsumsi daging.

2.3.2. Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

Kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dapat dilihat dari sejauh mana pencapaian dari setiap indikator kinerja pelayanan RPJMD, maupun pencapaian realisasi anggaran. Gambaran capaian kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau berdasarkan indikator sasaran/target Renstra Dinas Pertanian dan Pangan periode sebelumnya dapat dilihat pada Tabel. II-6.

Dari Tabel.II.6, dapat diketahui bahwa pada beberapa indikator terdapat kesenjangan antara target dan realisasi kinerja pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, yaitu :

- Indikator Produksi daging sapi dan kerbau tahun 2014 sudah melebihi target, namun pada tahun 2015 mengalami penurunan dan hanya mencapai target 93% dan tahun 2016 realisasi juga belum dapat mencapai target namun realisasinya meningkat mencapai 96%. Untuk produksi daging kerbau tahun 2014 capaiannya sudah melebihi target namun turun pada tahun 2015 dan kembali naik dan melebihi target pada tahun 2016.
- Pada indikator jumlah populasi ternak, jumlah populasi ternak tahun 2014 2015 untuk sapi potong telah dapat mencapai target yang ditetapkan dengan rasio melebihi 1, namun pada tahun 2016 populasi ternak sapi tidak mencapai target yang ditetapkan hanya mencapai 92% dari target yang telah ditetapkan. Sebenarnya dari segi jumlah populasi ternak sapi potong mengalami peningkatan secara terus menerus selama 3 tahun terakhir, namun untuk capaian target yang telah ditetapkan pada tahun 2016 belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan tersebut. Pada unggas capaian jumlah populasi unggas sudah mencapai target malah sudah melebihi target namun pada jumlah populasi ternak ruminansia belum mencapai target terutama pada ternak kerbau dan kambing. Pada ternak sapi, walaupun populasinya belum mencapai target tapi dari tahun ke tahun menunjukkan trend positif yang menunjukkan hasil dari upaya-

upaya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam meningkatkan populasi ternak.

Tabel II-6. Pencapaian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2014 – 2016

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian Renstra Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
		Tahun 0	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6						
1	Produksi Daging Sapi dan Kerbau (kg)	11.137.293	10.489.942	11.250.074	11.690.190	11.137.293	10.489.942	11.471.252	1,06	0,93	0,98
	- Daging Sapi	9.297.618	8.676.703	9.384.570	9.759.953	9.297.618	8.676.703	9.396.286	1,07	0,92	0,96
	- Daging Kerbau	1.839.675	1.813.239	1.865.504	1.930.238	1.839.675	1.813.239	2.074.966	1,01	0,97	1,07
2	Produksi Daging Unggas (kg)	43.052.452	48.728.950	46.139.904	52.958.452	44.775.582	50.921.589	51.753.757	0,92	1,10	0,98
	- Ayam Buras	3.302.202	3.489.583	4.202.926	5.838.526	4.043.996	5.613.968	4.178.656	1,16	1,33	0,71
	- Ayam ras Pedaging	39.750.250	45.239.366	41.936.978	47.119.926	40.731.586	45.307.621	47.575.101	0,90	1,08	1,01
3	Populasi										
	- Sapi Potong (ekor)	175.431	194.721	223.921	252.038	217.652	229.634	231.860	1,12	1,03	0,92
	- Sapi Perah (ekor)	266	315	370	-	143	140	132	0,45	0,38	-
	- Kerbau (ekor)	32.237	41.436	46.609	52.757	43.163	39.367	33.855	1,04	0,84	0,64
	- Kambing (ekor)	178.460	192.910	204.477	219.241	184.899	195.827	180.671	0,96	0,96	0,82
	- Domba (ekor)	4.720	5.264	5.568	-	8.242	7.354	9.225	9,225	1,57	1,32
	- Babi (ekor)	52.801	57.500	72.732	-	47.324	48.033	47.543	0,82	0,66	-
	- Ayam Buras (ekor)	3.170.908	3.350.666	3.366.001	3.381.337	3.327.820	3.746.784	5.480.433	0,99	1,11	1,62
	- Ayam Ras Petelur (ekor)	146.430	166.749	170.074	-	67798	65.628	162.285	0,41	0,39	-
	- Ayam Ras Daging (ekor)	36.971.746	39.308.628	41.026.046	42.743.464	39.987.136	39.404.056	46.266.787	1,02	0,96	1,08
	- Iuk (ekor)	249.579	271.257	440.506	-	289.238	259.363	244.039	1,07	0,59	-
4	Konsumsi										
	- Daging (kg/kap/thn)	7,33	7,34	7,46	7,47	10,00	11,90	12,30	1,36	1,60	1,65
	- Telur (kg/thn)	11,4	11,31	11,38	11,42	10,80	9,00	8,60	0,95	0,79	0,75
5	NTP Peternakan	102,12	103,14	104,17	105,22	101,56	100,76	100,47	0,98	0,96	0,95

- Nilai Tukar Petani sub sektor peternakan selama periode 2014-2016 belum dapat mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2014 Nilai Tukar Petani 101,56 menurun menjadi 100,47 pada tahun 2016. Penurunan ini salah satunya didorong oleh turunnya harga jual ternak sapi yang cukup signifikan akibat terjadinya wabah penyakit Jembrana yang menyerang sapi bali di Provinsi Riau sehingga peternak banyak menjual dengan harga murah karena ancaman mati mendadak atau potong paksa. Disamping itu, NTP yang rendah juga disebabkan oleh sistem pemasaran yang ada tidak memberikan

insentif yang layak kepada peternak. Para peternak tidak mempunyai daya tawar sehingga peran pedagang menjadi dominan dalam menentukan harga. Pada sisi lain perdagangan ternak hidup antar pulau dan wilayah menimbulkan biaya angkutan dan resiko ekonomi yang besar, sementara perdagangan karkas belum layak dilakukan karena infrastruktur yang tersedia belum memadai. Untuk dapat meningkatkan nilai NTP ini maka perlu dukungan lebih kuat kepada peternak untuk lebih meningkatkan produktifitas dan produksi sehingga nilai yang diperoleh petani lebih besar dan berusaha menekan harga sarana produksi dengan menyediakannya ketika dibutuhkan.

2.3.3. Capaian Kinerja Keuangan

Penyerapan anggaran belanja langsung didasarkan pada realisasi belanja langsung yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau memperoleh anggaran belanja langsung dan realisasinya tahun 2014- 2016 dengan rincian per program seperti tercantum dalam Tabel 2.3.1.

Tabel 2.3.1 . Capaian kinerja keuangan Belanja Langsung periode 2014 – 2017 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

NO	PROGRAM	ANGGARAN PADA TAHUN (Rp. Juta)				REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- (Rp. Juta)				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE				RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	ANGGARAN	REALISASI
A	UTAMA														
1	Peningkatan Kesejahteraan Petani	6.605	6.515	4.724	927	1.073	3.384	4.319	685	0,16	0,52	0,91	0,74	5.948	2925
2	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	5.726	9.488	11.014	7.021	4.083	7.380	9.590	6.588	0,71	0,78	0,87	0,94	8.746	7.018
3	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	95.167	55.007	24.544	37.168	14.878	45.068	20.286	20.667	0,16	0,82	0,83	0,56	58.239	26.744
4	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	1.739	2.311	2.939	1.411	1.437	2.026	2.773	1.245	0,83	0,88	0,94	0,88	2.329	2.079
B	PENDUKUNG	7.046	8.912	24.194	4.569	4.279	6.484	21.000	4.302	0,61	0,92	0,87	0,94	75.262	38.766

Dari tabel di atas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

Dari tabel di atas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja Langsung pada tahun 2015 jika dibandingkan dengan tahun 2014 pada program Peningkatan Kesejahteraan Petani mengalami sedikit penurunan sekitar 1% dari 6.605.179.403 menjadi 6.515.323.000. Serapan anggaran untuk tahun 2014 hanya sekitar 16% dan tahun 2015 naik menjadi 52%. Pada tahun 2016 anggaran untuk Program Peningkatan Kesejahteraan Petani mengalami penurunan hingga 27% sehingga anggaran menjadi 4.725.978.796. Dengan anggaran tersebut dana yang terserap mencapai 91% dari target yang ditetapkan.
2. Pada Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Ternak dana yang tersedia dari tahun 2014 sampai 2016 setiap tahun mengalami peningkatan dengan realisasi anggaran yang cukup tinggi yang juga terus mengalami peningkatan. Sedangkan untuk Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan anggaran yang tersedia dari tahun 2014 hingga 2016 terus mengalami penurunan namun yang menggembirakan anggaran yang tersedia tersebut realisasi anggaran setiap tahunnya mengalami peningkatan dari yang awalnya tahun 2014 hanya terealisasi sebesar 16%, pada tahun 2015 realisasi mencapai 82% dan tahun 2016 meningkat lagi menjadi 83%.
3. Pada Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan anggaran setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan kenaikan jumlah anggaran sebesar 32,83% pada tahun 2015 dan tahun 2016 naik sebesar 27,19%. Untuk realisasi anggaran pada program ini cukup besar dengan realisasi anggaran tahun 2016 mencapai 94%.

Rendahnya realisasi anggaran pada Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan ditahun 2014 adalah kegagalan proses pengadaan pihak ketiga yang tidak mempunyai kemampuan dalam menanggulangi proses pengadaan awal dari segi finansial dimana harga pada sumber bibit mengalami kenaikan sehingga tidak sesuai dengan harga penawaran awal. Hal lain yang menjadi kendala adalah sulitnya mencari sumber bibit sapi bakalan dan sapi indukan karena banyaknya permintaan dari kab/kota di Provinsi Riau maupun dari luar Provinsi Riau khususnya sapi

Bali, akibatnya pengadaan bibit sapi tidak dapat terlaksana yang mengakibatkan dana yang sudah dianggarkan tidak dapat terserap.

2.3.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Berdasarkan telaahan terhadap Renstra SKPD Kabupaten/Kota, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dan Renstra Kementerian Pertanian, tidak semuanya dapat dikerjakan dan hasilnya mencapai target yang telah ditetapkan. Keragaan kinerja yang ditunjukkan oleh masing-masing indikator setiap tahunnya berfluktuasi.

Perkembangan pembangunan peternakan selama tiga tahun pelaksanaan Renstra (2014 – 2016) hasilnya belum optimal sebagaimana yang telah direncanakan. Kebijakan dan arah pembangunan peternakan sebagai bagian integral dari pembangunan pertanian mengalami perubahan terutama pada fokus pembangunan yang harus dicapai sesuai dengan 9 Agenda Prioritas (Nawa Cita) yang telah ditetapkan Presiden dengan program prioritas *membangun dan mewujudkan kedaulatan pangan*.

Selama kurun waktu pelaksanaan Rencana Strategis ini, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan maka telah teridentifikasi berbagai tantangan dan peluang, yaitu:

1) Tantangan

- a) Kemampuan permodalan peternak terbatas;
- b) Penerapan teknologi terbatas;
- c) Daya saing produk masih rendah;
- d) Produktivitas ternak masih rendah;
- e) Pemotongan ternak ruminansia betina produktif;
- f) Penyebaran Penyakit Infectious Emerging (PIE) sebagai eksis keterbukaan wilayah secara geografis.

2) Peluang

- a) Tersedianya SDA (Sumber Daya Alam), SDM (Sumber Daya Manusia), SDB (Sumber Daya Buatan) dalam pengembangan agribisnis peternakan;

- b) Posisi wilayah Riau yang strategis dalam menjangkau daerah-daerah pemasaran baik nasional maupun internasional;
- c) Pengembangan agribisnis peternakan terbuka luas;
- d) Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat dan membaik di Provinsi Riau;
- e) Kebijakan Pemerintah yang sangat mendukung;
- f) Banyaknya sektor swasta tumbuh dan berkembang di Provinsi Riau;
- g) Infrastruktur (jalan, jembatan, listrik, komunikasi) semakin baik.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu strategis adalah kebijakan fundamental atau prioritas program yang menentukan situasi yang sangat penting, dan pilihan yang dihadapi organisasi pada waktu sekarang dan dimasa mendatang. Isu-isu dapat juga diartikan sebagai persoalan-persoalan yang memiliki dampak signifikan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi SKPD yang mungkin untuk diselesaikan dalam kurun waktu perencanaan.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas

Pelaksanaan pembangunan Peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Riau masih banyak menemui permasalahan. Masalah-masalah tersebut mempengaruhi hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Riau. Setelah dilakukan identifikasi permasalahan tersebut maka diperoleh peta permasalahan seperti pada Tabel III-1.

Tabel III-1: Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Keamanan masyarakat dari ancaman penyakit hewan masih rendah	Pengendalian penyakit hewan menular belum optimal	Penyakit hewan belum terpantau
			Pelayanan veteriner rendah
		Pengawasan Pangan asal ternak ASUH belum optimal	penerapan NKV rendah
			Kapasitas SDM kesmavet rendah
			Penerapan kesejahteraan hewan rendah
			Cemaran pada Pangan Asal Ternak tinggi
2	Produksi Daging Ruminansia Lokal rendah	Jumlah populasi ternak ruminansia rendah	Angka Kelahiran IB rendah
			Angka Kelahiran INKA rendah
			Kurang pakan berkualitas
		produksi ternak lokal rendah	Pemilikan Ternak Tingkat Rumah Tangga rendah
			Kemampuan penyediaan/pasokan ternak lokal rendah

Berdasarkan pemetaan permasalahan tersebut maka dapat diuraikan yaitu :

3.1.1. Aspek Teknis

1) Lambannya Peningkatan produksi dan produktivitas ternak

Perkembangan produktivitas beberapa komoditas peternakan selama 5 (lima) Tahun terakhir sangat lamban. Komoditas peternakan dimana pelaku pemeliharaan ternak (produsen) sebagian besar didominasi oleh peternak kecil dengan keterampilan beternak yang masih rendah (penguasaan teknologi dan informasi peternakan yang kurang). Sistem pemeliharaan didominasi oleh ekstensif maupun semi intensif dan hanya sebagian kecil yang intensif, menyebabkan produktivitas tidak optimal. Kualitas bibit ternak menunjukkan gejala penurunan, yang disebabkan oleh seleksi dan penyingkiran (calling) ternak belum dilaksanakan secara efektif dan para peternak lebih memilih menjual ternak yang berkualitas terbaik karena harganya lebih tinggi.

Adanya risiko kejadian gangguan kesehatan dan penyakit hewan di suatu wilayah atau bahkan adanya kasus kematian ternak berakibat pada penurunan perekonomian, kesejahteraan peternak dan kesehatan masyarakat.

Pelayanan kesehatan hewan belum optimal, diantaranya : pelayanan medik veteriner dan medik reproduksi ternak, pelayanan jasa nutrisi dan pengawasan mutu pakan, tindak surveillance dan pengamatan dini penyakit hewan, pengawas mutu hygiene sanitasi produk asal ternak. Konsumsi protein hewan masyarakat di Provinsi Riau masih dibawah norma gizi nasional. Terdapat kesenjangan antara tingkat konsumsi masyarakat perkotaan dengan masyarakat pedesaan, sedangkan produsen utama adalah masyarakat pedesaan.

Salah satu faktor yang dapat meningkatkan produksi dan produktivitas adalah masalah kesehatan hewan dan pengendalian penyakit ternak. Oleh karena itu, status dan kondisi kesehatan hewan harusnya dapat dikendalikan untuk menghasilkan produk asal hewan yang higienis dan memenuhi kaidah aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).

2) Kondisi Sarana dan Prasarana belum memadai

Lahan sebagai basis ekologi pendukung pakan belum dapat dimanfaatkan seluruhnya secara optimal. Padang penggembalaan belum dimanfaatkan secara optimal. Dalam pelayanan, kondisi geografis Provinsi Riau yang luas sehingga menyebabkan kurang optimalnya daya jangkau pelayanan peternakan.

Penanganan keberhasilan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner melalui peran Puskesmas belum berjalan optimal karena keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia. Jumlah Puskesmas pada tahun 2014, jumlah Puskesmas yang ada secara kelembagaan hanya 60 unit dari 158 kecamatan, yang seharusnya terdapat 1 unit di masing-masing kecamatan, bahkan ada juga cakupan lokasi kerja Puskesmas melebihi satu kecamatan. Belum lagi persoalan kondisi bangunan dan peralatan yang tidak representative atau yang rusak. Dari data Tahun 2014, dari 60 Unit kelembagaan Puskesmas yang ada, 4 Puskesmas belum ada bangunan dan 9 unit dalam kondisi rusak.

3) Penerapan teknologi peternakan masih rendah

Penguasaan teknologi di bidang peternakan masih rendah, baik teknologi budidaya, pakan ternak dan penerapan Kawin Suntik (Inseminasi Buatan-IB), teknologi pengelolaan pakan ternak, teknologi sistem informasi kesehatan hewan nasional (SIKHNAS), teknologi pendeteksian dan pengamatan penyakit secara dini, teknologi pengujian/identifikasi melalui laboratorium veteriner juga masih rendah.

4) Industri Hilir peternakan serta pemasarannya masih terbatas

Kondisi Industri hilir peternakan masih sangat terbatas, padahal nilai tambah pada produk olahan ini sangatlah besar, industri hilir peternakan baru berkembang pada skala kecil di tingkat rumah tangga. Untuk itu, perlu dukungan dari kegiatan budidaya peternakan dan kesehatan ternak (sektor hulu). Pemeliharaan ternak di Provinsi Riau yang sebagian besar hanya

sebagai usaha sambilan dan dipelihara secara non intensif/semi intensif sehingga tidak memberikan pendapatan yang optimal. Disamping itu tidak adanya perencanaan pemasaran hasil secara periodik, menyebabkan peran hasil penjualan ternak dalam ekonomi keluarga masih bersifat mengatasi kebutuhan mendesak. Hal lainnya adalah belum terintegrasinya usaha peternakan dari hulu sampai hilir sehingga mengakibatkan kurang efisiennya mata rantai tataniaga peternakan. Disamping itu kualitas atau kondisi ternak yang dipasarkan kurang memuaskan, fasilitas transportasi yang kurang memadai sehingga menyebabkan penyusutan bobot badan dan kecelakaan/kematian ternak selama dalam proses pengangkutan. Fasilitasi ternak dalam bidang transportasi juga menjadi komponen penting dalam pencapaian kesejahteraan hewan yang lebih baik.

5) Pencegahan Penyakit Infectious Emerging (PIE) belum optimal

Upaya menekan penyakit ternak di Provinsi Riau, sampai saat ini masih merupakan persoalan yang masih dihadapi oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Pemerintah Provinsi Riau. Upaya pencegahan dengan vaksinasi, pemberantasan (eliminasi), pengawasan lalu lintas, sosialisasi dan koordinasi dilakukan untuk menekan penyebaran penyakit ternak, namun kasus penyakit ternak masih saja terjadi, tercatat dari Tahun 2009 – 2013 ditemukan 15 jenis penyakit ternak yang strategis dan non strategis ditemukan di Provinsi Riau, diantaranya :

- 1) Strategis yaitu Rabies, *Avian Influenza (AI)*, Jembrana, *Helminthiasis* , *Classical Swine Fever (Hog cholera)*, *Septicaemia Epizooticae (SE)*, Surra, dan Parasit darah.
- 2) Non Strategis yaitu *Coccidiosis*, *New castle Disease*, *Fasciolosis*, *Scabies*, *Pink eye*, *Orf*, *Pullorum*.

Dari penyakit tersebut diatas terdapat penyakit yang bersifat zoonosis dan penyakit yang tergolong dalam foodborne disease. Penyakit zoonosis yang ada di Provinsi Riau yaitu : Rabies, AI, *Helminthiasis*, *Scabies*, *Pink Eye*, *Orf* dan *Pullorum*. Adapun penyakit yang tergolong *foodborne disease* adalah *Fasciolosis*, *Helminthiasis* dan *Pullorum*.

Provinsi Riau telah dinyatakan bebas *Brucellosis* berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 2541/Kpts/PD.610/2009 tanggal 15 Juni 2009. Sedangkan untuk penyakit *anthraxs* berdasarkan hasil surveilans BPPV Bukit Tinggi belum ditemukan adanya penyakit *anthraxs* di Provinsi Riau. Walaupun Provinsi Riau telah dinyatakan bebas *Brucellosis* dan kuman *anthraxs* belum ditemukan ada pada ternak, tetapi upaya pencegahan dan pengamanan wilayah dari masuknya penyakit yang berasal dari wilayah tertular harus terus dilakukan dan ditingkatkan.

Setiap Tahun rata-rata jumlah pelayanan baik pasif maupun aktif di klinik hewan berkisar 200–300 ekor sementara pelayanan untuk laboratorium menerima specimen berkisar 5000 spesimen setiap tahunnya. Rendahnya tingkat pelayanan di klinik hewan maupun labarotoriun disebabkan masih kurangnya SDM dan keterbatasan sarana prasarana dalam meningkatkan tingkat pelayanan. Misalnya di UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan, terdapat 13 SDM teknis. Dari 13 PNS hanya ada 8 orang PNS yang berlatar belakang medik veteriner dan paramedik.

6) Pemanfaatan sumber daya pengembangan (lahan sebagai basis penyedia pakan dan budidaya) belum optimal.

Data sementara yang di release oleh BPS Tahun 2013 jumlah sapi dan kerbau di provinsi Riau yang diperoleh berdasarkan rumah tangga peternakan sebanyak 197.700 ekor. Jika dilihat dari potensi lahan usaha peternakan di Provinsi Riau sebanyak 1.112.159 ekor, menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan sebagai penyedia pakan budidaya belum optimal. Peluang pemanfaatan pengembangan sapi dan kerbau masih cukup tinggi sebesar sebesar 82,14 % atau 913.559 ekor. Daya dukung lahan untuk pengembangan kambing 507.419 ekor, populasi kambing 214.707 ekor, peluang pengembangan kambing sebanyak 289.712 ekor.

3.1.2. Aspek Sosial Masyarakat

1) Akses peternak terhadap permodalan masih terbatas

Modal adalah unsur utama dalam pengembangan komoditas pangan dan peternakan. Sampai saat ini peternak masih kesulitan untuk akses terhadap permodalan ini, meskipun pemerintah sudah banyak mengeluarkan skim kredit untuk bidang peternakan. Kesulitan ini disamping disebabkan terbatasnya informasi, kemampuan manajerial dan pengetahuan peternak, juga karena keengganan peternak berurusan dengan pihak perbankan serta banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi dimana mereka tidak mampu memenuhinya.

Belum optimalnya fungsi kelembagaan, rendahnya dukungan institusi lain yang terkait dalam mendukung pembangunan peternakan dan kesehatan hewan. Kelompok tani yang tercatat cukup banyak, namun belum berperan nyata sebagai lembaga kerjasama dalam bidang produksi/ budidaya, pengolahan maupun pemasaran hasil ternak.

2) Budaya/ kebiasaan masyarakat

Teknologi budidaya sebenarnya sudah berkembang pesat, namun penerapan ditingkat masyarakat/ peternak belum sebagaimana yang diharapkan. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhinya adalah budaya atau kebiasaan masyarakat. Adanya kebiasaan melepaskan ternak (budidaya tradisional) juga menyebabkan rendahnya produktivitas ternak daerah tersebut.

Di sub sektor peternakan terdapat permasalahan sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pola pangan melalui 3 B (Bergizi, Beragam, Berimbang) dan ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal).
- b. Motivasi dan keterampilan penduduk asli masih lemah sehingga pengembangan usaha peternakan baru terlaksana pada wilayah-wilayah penduduk pendatang (transmigran/urban). Hal ini akan menjadi kendala dalam upaya pemberdayaan masyarakat lokal melalui usaha peternakan.
- c. Kualitas manajemen Peternak yang rendah.

3.1.3. Aspek Sumberdaya Manusia

1) Kapasitas dan Profesionalisme SDM aparatur belum memadai

Aparatur Negara merupakan unsur utama sumberdaya manusia yang mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Untuk dapat membentuk sosok aparatur pemerintah yang baik, dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat). Diklat adalah suatu kaharusan dari suatu organisasi birokrasi dan merupakan bagian dari upaya pengembangan sumberdaya manusia sekaligus sebagai salah satu solusi untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam suatu organisasi .

Sampai saat ini patut diakui bahwa SDM aparatur dituntut memiliki kapasitas yang memadai dan bahkan dituntut bekerja professional sesuai dengan perkembangan zaman yang serba maju dengan penuh dengan penerapan teknologi dalam pelaksanaann tugas pelayanan terhadap masyarakat. Sementara kondisi yang ada, adalah bahwa kemampuan dan cara kerja aparatur belum sebagaimana yang diharapkan, baik dari sisi ilmu teknis maupun dari sisi penguasaan teknologi yang semakin berkembang.

Dalam penempatan para pejabat pada jabatan struktural juga masih ditemui penempatan yang belum megacu kepada aspek “*the right man in the right place*“ terutama ditinjau dari sisi latar belakang pendidikan atau pengalaman bekerja selama ini.

Di Bidang Peternakan dan Kesehatan Ternak, keterbatasan jumlah dan tingkat kualifikasi aparat penyelenggara pembangunan peternakan khususnya tenaga professional bidang peternakan yaitu Dokter Hewan, Sarjana Peternakan, Paramedis Veteriner, Petugas Pengelola Reproduksi Ternak, Petugas Inseminasi Buatan, Penyuluh Peternakan.

2) Kapasitas SDM peternak masih rendah

Peternak merupakan SDM penting dalam pembangunan peternakan, sehingga dengan demikian kemampuan SDM peternak akan sangat mempengaruhi keberhasilan atau capaian hasil pembangunan. Peternak tanaman pangan dan peternakan secara umum didominasi oleh kaum tua dan dari kaum ibu-ibu, juga dengan pendidikan formal yang sangat rendah, hal ini membuat sulitnya dalam transformasi teknologi. Masih rendahnya SDM peternakan \pm 80% yang berusaha tani tamat SD ke bawah. Sebagai akibat dari hal tersebut adalah bahwa peternak lebih banyak diposisikan sebagai objek pembangunan ketimbang peternak sebagai pelaksana pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut maka kedepan peningkatan kapasitas peternak sebagai unsur penting dalam pelaksanaan pembangunan peternakan.

3.1.4. **Aspek Geografi dan Demografi**

1) Perubahan iklim global

Pemanasan global dan tingkat pencemaran lingkungan berdampak terhadap aktivitas dan kehidupan manusia. Perubahan pola hujan (*el-Nino dan La-nina*), sirkulasi angin, kenaikan muka air laut, rusaknya terumbu karang merupakan wujud dari pada perubahan iklim. Demikian juga dengan tingkat pencemaran lingkungan yang harus diwaspadai. Karena itu perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan dan adaptasi dari pemanasan global tersebut. Akhir-akhir ini Provinsi Riau diterpa bencana kabut asap sebagai akibat kebakaran hutan dan lahan terutama lahan gambut. Dalam jangka panjang kabut asap bukan saja berpengaruh terhadap kesehatan manusia, namun juga akan mengganggu terhadap pertumbuhan tanaman dan ternak, dan pada akhirnya akan mempengaruhi proses fotosintesa dan tentunya akan menurunkan produksi tanaman dan ternak.

2) Tingginya Pertumbuhan penduduk

Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Riau termasuk pada kategori yang tertinggi di Indonesia, meskipun Provinsi Riau berhasil dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) yang ditunjukkan dengan

rata-rata jumlah penduduk per-rumah tangga sebanyak 4 jiwa, tetapi laju pertumbuhan penduduk tetap tinggi. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk di Provinsi Riau lebih disebabkan oleh tingginya migrasi dari luar provinsi yang datang dengan berbagai alasan dan tujuan, antara lain migrasi karena bencana alam yang berasal dari Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara

Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000, jumlah penduduk Provinsi Riau berjumlah 3,75 juta dan sensus Tahun 2010 berjumlah 5,54 juta jiwa. Selama periode 2000 – 2010, rata-rata pertumbuhan penduduk Provinsi Riau meningkat sebesar 3,96% per-Tahun, jauh lebih tinggi dari pertumbuhan alami yang hanya 1,5% per Tahun.

Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi ini memberikan dampak negatif seperti semakin meningkatnya penduduk miskin, jumlah pengangguran, penyerobotan hutan dan lahan dan berbagai permasalahan sosial, budaya, ekonomi, politik dan lainnya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

3.2.1. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2001 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau 2000-2025, RPJMD Provinsi Riau merupakan tahap ketiga pembangunan secara menyeluruh di segala bidang dengan menekankan pertumbuhan perekonomian yang berdaya saing berdasarkan sumberdaya alam yang tersedia dan sumberdaya manusia yang berkualitas didukung oleh sistem informasi yang handal. Upaya pemantapan nilai-nilai budaya melayu sebagai ruh kehidupan masyarakat terwujud sebagai etika, orientasi, dan sumber inspirasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Riau; penyelenggaraan pembangunan; pelestarian lingkungan; asimilasi kultural; dan menjaga dan memelihara heterogenitas.

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu

strategis, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih telah merumuskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Tahun 2014 – 2019, yaitu

“ Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja, serta Pemantapan Aparatur “

Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah :

Maju : Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan berkualitas serta berteknologi tinggi yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Sejahtera : Terciptanya kondisi masyarakat yang makmur, aman dan nyaman serta merata dari segala aspek ekonomi, sosial, politik, hukum dan keamanan

Berdaya saing : Suatu kondisi pemerintah dan masyarakat yang tangguh, unggul dan memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang terhadap dinamika perubahan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai budaya, tatanan sosial yang agamis

Menurunnya kemiskinan : Suatu kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak dan bermartabat

Lapangan kerja : Tersedianya peluang dan kesempatan bagi angkatan kerja melalui kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat

Dari visi dan misi Pemerintah Provinsi Riau tersebut maka dilakukan identifikasi terhadap permasalahan, faktor penghambat dan pendorong pelayanan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Hasil identifikasi tersebut disajikan pada Tabel III.2.

Tabel III-2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Program 1.1. Peningkatan Kesejahteraan Peternak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas aparatur dinas belum optimal. 2. Jumlah petugas teknis tertentu masih kurang (Keterbatasan jumlah dan tingkat kualifikasi aparat penyelenggara pembangunan peternakan khususnya tenaga profesional bidang peternakan yaitu Dokter Hewan, Sarjana Peternakan, Paramedis Veteriner, Petugas Pengelola Reproduksi Ternak, Petugas Inseminasi Buatan, Penyuluh Peternakan) 3. Peran dan fungsi lembaga unit pelaksana teknis dan unit pelayanan teknis lainnya belum optimal. 4. Masih rendahnya SDM peternak \pm 80% yang berusaha tani tamat SD ke bawah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan permodalan peternak terbatas. 2. Penerapan teknologi terbatas. 3. Tidak tersedianya formasi rekrutmen aparatur seperti yang dibutuhkan yaitu Dokter Hewan, Sarjana Peternakan, Paramedis Veteriner, Petugas Pengelola Reproduksi Ternak, Petugas Inseminasi Buatan, Penyuluh Peternakan. 4. Banyak petugas yang dimutasikan ke institusi lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Pimpinan. 2. Sudah adanya Program dan kebijakan yang tegas tentang upaya pengentasan kemiskinan. 3. Penyediaan tenaga aparatur yang berkompeten. 4. Menempatkan petugas peternakan ke institusi yang menangani peternakan 5. Peningkatan frekuensi penyuluhan ke peternak
2	Program : 2.1. Peningkatan Kesejahteraan Peternak 2.2. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak. 2.3. Peningkatan Produksi Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas aparatur dinas belum optimal. 2. Jumlah petugas teknis tertentu masih kurang. 3. Pelayanan kesehatan hewan belum optimal 4. Pelaku pemeliharaan ternak (produsen) sebagian besar didominasi oleh peternak kecil dengan keterampilan beternak yang masih rendah (penguasaan teknologi dan informasi peternakan yang kurang). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum seimbang antara petugas medik dan paramedik veteriner dengan jumlah ternak yang harus mendapatkan pelayanan keswan. 2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan keswan. 3. Keterbatasan modal usaha 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Pimpinan. 2. Peningkatan jumlah petugas medik dan paramedik veteriner. 3. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan keswan. 4. Memfasilitasi peternak dalam memperoleh modal usaha dari lembaga

	Produksi Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> 5. Sistem pemeliharaan didominasi oleh ekstensif maupun semi intensif dan hanya sebagian kecil yang intensif, menyebabkan produktifitas tidak optimal. 6. Tingginya pemotongan ternak besar betina produktif. 7. Lahan sebagai basis ekologi pendukung pakan belum dapat dimanfaatkan seluruhnya secara optimal 8. Masih terbatasnya penguasaan teknologi peternakan. 9. Belum optimalnya fungsi kelembagaan peternakan dan keswan. 10. Kelompok tani yang tercatat cukup banyak, namun belum berperan nyata sebagai lembaga kerjasama dalam bidang produksi /budidaya, pengolahan maupun pemasaran hasil ternak 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Tingkat pengetahuan peternak masih rendah terutama terhadap manajemen pemeliharaan 5. Keterbatasan pemenuhan kebutuhan daging ternak besar 6. Rendahnya penguasaan peternak terhadap teknologi pemanfaatan Lahan peternakan sebagai kawasan pengembangan ternak 7. Masih kurangnya sosialisasi dan pelatihan penguasaan teknologi 8. Kurang jumlah aparatur peternakan. 	<ol style="list-style-type: none"> keuangan. 5. Memberikan bimbingan teknis kepada peternak dalam manajemen pemeliharaan. 6. Diversifikasi produk pangan asal hewan. 7. Memberikan bimbingan teknis kepada peternak dalam teknologi pemanfaatan lahan peternakan. 8. Meningkatkan frekuensi sosialisasi dan pelatihan terhadap penguasaan teknologi. 9. Menjadikan usaha sub sektor peternakan sebagai usaha pokok
3	Program; 3.1. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terintegrasinya usaha peternakan dari hulu sampai hilir sehingga mengakibatkan kurang efisiennya mata rantai tataniaga peternakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan teknologi terbatas. 2. Adanya anggapan bahwa usaha peternakan itu beresiko tinggi, padat modal dan likuiditasnya rendah 3. Biaya produksi tinggi 4. Belum adanya regulasi tentang pengembangan kawasan peternakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Pimpinan 2. Insentif pajak dan skim kredit khusus pembibitan ternak. 3. Pemanfaatan limbah/hasil samping pertanian dan perkebunan sebagai pakan ternak. 4. Tersedianya regulasi pengembangan kawasan peternakan

3.2.2. Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam rangka mewujudkan pencapaian visi yang telah ditetapkan misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 2014–2019, sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur
2. Meningkatkan pelayanan pendidikan
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan
4. Menurunkan kemiskinan
5. Mewujudkan pemerintah yang baik, professional (*good governance dan clean governance*) dan handal
6. Memantapkan pembangunan masyarakat yang berbudaya, beriman dan bertaqwa serta pemantapan stabilitas politik
7. Memperkuat pembangunan pertanian dan perkebunan
8. Meningkatkan penataan lingkungan, kebersihan dan pariwisata
9. Meningkatkan peran swasta dalam pembangunan

Dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk Tahun 2014 – 2019 ini terlihat bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih telah menetapkan pembangunan pertanian dan perkebunan pada subsektor peternakan sebagai salah satu bidang yang menjadi perhatian dan akan diperkuat dalam kurun waktu 2014 – 2019, sebagaimana tercantum pada misi ke-7, yaitu ***“Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan”***.

Dalam upaya pencapaian visi misi kepala daerah dalam hal ini gubernur, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai peran dalam mewujudkan pembangunan peternakan dalam pencapaian masyarakat sejahtera dan berdaya saing. Sinergi dengan visi misi tersebut Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan bertanggungjawab terhadap pembangunan peternakan dalam hal menjamin ketersediaan pangan hewani (daging, telur, susu), meningkatnya kontribusi ternak domestik dalam penyediaan pangan hewani, meningkatnya ketersediaan protein hewani asal ternak dan tersedianya daging sapi/kerbau domestik maupun nasional.

Untuk mencapai misi tersebut di atas tidak lepas dari dukungan tata pemerintahan yang handal dan kerjasama lintas sektor lingkup pemerintah Provinsi Riau. Untuk menciptakan tatakelola yang handal tersebut perlu melakukan terobosan melalui kinerja yang dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi dan akuntabel. Untuk itu diperlukan integritas moral aparat penyelenggara pembangunan peternakan dengan pendekatan bekerja secara profesional.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Dinas

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian

Kementerian Pertanian telah menetapkan Visi Pembangunan Tahun 2009-2014, yaitu *“Terwujudnya Pertanian Industrial Unggul Berkelanjutan Yang Berbasis Sumberdaya Lokal Untuk Meningkatkan Kemandirian Pangan, Nilai Tambah, Daya Saing, Ekspor dan Kesejahteraan Petani “*

Untuk mewujudkan Visi tersebut, telah ditetapkan Misi yang akan dilaksanakan, yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan yang efisien, berbasis iptek dan sumberdaya lokal, serta berwawasan lingkungan melalui pendekatan sistem agribisnis.
2. Menciptakan keseimbangan ekosistem pertanian yang mendukung keberlanjutan peningkatan produksi dan produktivitas untuk meningkatkan kemandirian pangan.
3. Mengamankan plasma-nutfah dan meningkatkan pendayagunaannya untuk mendukung diversifikasi dan ketahanan pangan.
4. Menjadikan peternak yang kreatif, inovatif, dan mandiri serta mampu memanfaatkan iptek dan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk pertanian berdaya saing tinggi.
5. Meningkatkan produk pangan segar dan olahan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) dikonsumsi.

6. Meningkatkan produksi dan mutu produk pertanian sebagai bahan baku industri.
7. Mewujudkan usaha pertanian yang terintegrasi secara vertikal dan horisontal guna menumbuhkan usaha ekonomi produktif dan menciptakan lapangan kerja di pedesaan.
8. Mengembangkan industri hilir pertanian yang terintegrasi dengan sumberdaya lokal untuk memenuhi permintaan pasar domestik, regional dan internasional.
9. Mendorong terwujudnya sistem kemitraan usaha dan perdagangan komoditas pertanian yang sehat, jujur dan berkeadilan.
10. Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.

Renstra Kementerian Pertanian RI akan dijadikan sebagai salah satu acuan dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau yang akan datang.

Mengacu kepada Renstra Kementerian Pertanian, target kinerja dari Kementerian Pertanian selama 2010-2014 adalah pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan. Pencapaian swasembada ditujukan untuk daging sapi 0,66 juta ton pada Tahun 2014.

Selama Tahun 2009-2013 rata-rata pertumbuhan produksi cukup tinggi setiap Tahunnya untuk komoditas peternakan, yaitu daging sapi (4,2 persen), daging ayam buras (4,29 persen), daging itik (4,37 persen).

Dengan mengacu pada RPJMN, arah kebijakan umum pembangunan peternakan 2010 – 2014 adalah untuk: (i) menjamin ketersediaan dan mutu benih dan bibit ternak; (ii) meningkatkan populasi dan produktifitas ternak; (iii) meningkatkan produksi pakan ternak; (iv) meningkatkan status kesehatan hewan; (v) menjamin produk hewan yang ASUH dan berdaya saing; dan (vi) meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Kebijakan ketersediaan dan mutu benih dan bibit ternak akan diarahkan untuk: (i) mengoptimalkan kelembagaan perbibitan dan sertifikasi; (ii) pemwilayahan sumber bibit berbasis potensi dan agroekosistemnya; (iii) pengembangan kawasan/sentra sumber

bibit; (iv) pelestarian sumber daya genetik secara berkelanjutan; (v) peningkatan penerapan teknologi perbibitan; dan (vi) pengembangan usaha dan investasi perbibitan.

Dalam aspek populasi dan produktifitas ternak diarahkan untuk : (i) meningkatkan populasi dan optimalisasi produksi ternak ruminansia dan non ruminansia; (ii) melaksanakan revitalisasi persusuan; (iii) melaksanakan restrukturisasi perunggasan; dan (iv) pengembangan kelembagaan dan usaha.

Pada aspek produksi pakan ternak diarahkan untuk: (i) menambah penyediaan pakan dan air; (ii) mengembangkan teknologi dan industri pakan ternak berbasis sumber daya lokal; (iii) meningkatkan pengawasan mutu dan keamanan pakan; serta (iv) pengembangan dan pemanfaatan lahan kehutanan.

Pada aspek kesehatan hewan diarahkan untuk : (i) meningkatkan perlindungan hewan, pengamatan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan; (ii) meningkatkan pelayanan kesehatan hewan; (iii) meningkatkan kualitas dan kuantitas obat hewan; (iv) meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga dokter hewan dan paramedik veteriner.

Pada aspek keamanan produk hewan akan diarahkan untuk ; (i) menguatkan peran dan fungsi lembaga otoritas veteriner; (ii) meningkatkan jaminan produk hewan yang ASUH dan daya saing produk hewan; (iii) meningkatkan penerapan kesrawan; (iv) mengoptimalkan pengaturan stock daging; dan (v) mengoptimalkan pengaturan dan pemasaran daging sapi.

Selanjutnya, pada aspek peningkatan peran dan fungsi kelembagaan diarahkan untuk : (i) meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan serta SDM peternakan; (ii) meningkatkan pelayanan prima pada masyarakat; (iii) meningkatkan kerjasama internasional; (iv) meningkatkan kualitas perencanaan, evaluasi, data dan informasi; (v) meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Strategi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan pembangunan peternakan diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam pembangunan peternakan yaitu :

1. Memperlancar arus produk peternakan melalui peningkatan efisiensi distribusi.
2. Meningkatkan daya saing produk peternakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal.

3. Memperkuat regulasi untuk mendorong peran peternak dalam negeri sehingga menjadi mandiri.
4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar sektor terkait serta *networking* antar daerah.
5. Meningkatkan promosi produk peternakan untuk ekspor.
6. Memperkuat kelembagaan peternakan di semua lapisan dan otoritas veterine.

Dari uraian diatas, terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya, hasil indentifikasi masalah tersebut digambarkan pada Tabel dibawah ini :

Tabel III-3. Identifikasi Permasalahan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Berdasarkan Renstra Kementerian Pertanian.

Aspek Capaian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Pendorong	Penghambat	
1	2	3	4	5	6
Peningkatan populasi ternak	Populasi ternak : - sapi potong 175.431 ekor - Kerbau 32.237 ekor - Kambing 178.460 ekor	Statistik Peternakan Provinsi Riau	Dukungan kebijakan dan dana dari Pemerintah	- Aspek teknis - Sosial Budaya Masyarakat	- Kinerja aparatur belum maksimal - Pembinaan kpd peternak belum optimal

Pada Tahun 2014 ini Kementerian Pertanian RI telah menyusun dan mengeluarkan “*Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) “* yang secara simbolis telah diserahkan kepada berbagai pihak termasuk Presiden RI pada saat acara pembukaan Pekan Nasional KTNA di Kabupaten Malang – Provinsi Jawa Timur pada bulan Juni 2014 yang lalu. SIPP ini juga diharapkan menjadi arahan sekaligus acuan bagi seluruh komponen bangsa, dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Renstra kementerian/ Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan turunannya, baik dipusat maupun daerah. Memperhatikan peran strategis dan multidimensi pertanian khususnya pada subsektor peternakan serta tantangan besar kedepan, maka paradigma “ pembangunan berbasis

pertanian (*agricultural led development*) “ sudah tidak relevan lagi, perlu direorientasi dengan paradig baru. Paradigma baru tersebut pertama adalah **Pertanian untuk Pembangunan (Agriculture for Development)** bahwa rencana pembangunan perekonomian nasional disusun dan dilaksanakan berdasarkan tahapan pembangunan pertanian secara rasional. Sektor pertanian terutama pada subsektor peternakan dijadikan sebagai motor penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh. Paradigma yang kedua adalah **Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan** sebagai transformasi dari orientasi pembangunan berbasis bahan baku fosil menjadi berbasis sumberdaya terbarukan (sumberdaya hayati). Paradigma ini menuntut peran pertanian tidak hanya penghasil utama bahan pangan, tetapi menjadi penghasil biomassa bahan baku biorefinery untuk menghasilkan bahan pangan, pakan, pupuk, serat, energy, produk farmasi, kimiawi dan bioproduk lainnya.

Berdasarkan kondisi yang ada slama ini dan menyadari akan tantangan dimasa depan, maka Visi Pembangunan Pertanian Indonesia 2015 – 2045 dirumuskan sebagai berikut :

“ Terwujudnya system pertanian-bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi dari sumberdaya hayati pertanian dan kelautan tropika “

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dalam priode 2015 – 2045, maka pembangunan pertanian diarahkan untuk mewujudkan 10 sasaran, dimana 2 (dua) diantaranya yang sangat terkait dengan Sektor perternakan dan kesehatan hewan adalah

1. Meningkatnya pendapatan dan taraf hidup penduduk perdesaan sehingga seluruh penduduk desa terbebas dari kemiskinan paling lambat pada tahun 2030.
2. Terwujudnya kemandirian pangan nasional paling lambat pada 2020, kedaulatan pangan nasional, tercapainya pola makan sehat dan beragam paling lambat pada 2025 dan kedaulatan pangan komunitas paling lambat 2045.

Pembangunan sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan dilaksanakan dengan **Paradigma Biokultura**, yaitu kesadaran, semangat, nilai budaya, dan tindakan memanfaatkan sumberdaya hayati bagi kesejahteraan manusia dalam ekosistem yang

harmonis. Strategi utama yang dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan system Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan adalah :

1. Pengembangan sumberdaya insan yang kompeten dan berkarakter pertanian
2. Optimalisasi sumberdaya alam
3. Sistem inovasi ilmu pengetahuan dan rekayasa teknologi
4. Infrastruktur pertanian, akses pembiayaan dan akses pasar
5. Sistem usahatani agroindustri dan *agroservices* terpadu
6. Klaster rantai nilai bioindustri
7. Lingkungan pemberdaya bio-bisnis

Salah satu kebijakan yang akan diterapkan dalam mewujudkan tujuan dan strategi diatas adalah dengan menerapkan “ **Kebijakan Ketahanan Pangan, air dan energi** “. Sejalan dengan itu, juga telah disusun Tahapan Periodik Pembangunan Pertanian khususnya pada subsektor peternakan, dimana periode **2015 – 2019** merupakan periode “ **Kokohnya fondasi sistem pertanian-bioindustri berkelanjutan** “ menuju tercapainya keunggulan daya saing pertanian khususnya pada sektor peternakan terpadu berbasis sumberdaya alam berkelanjutan, sumberdaya insani berkualitas dan berkemampuan IPTEK bioindustri untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan peternak.

Disamping itu juga telah ditetapkan “ **peta jalan (road map)** “ pengembangan system pertanian-bioindustri berkelanjutan, dimana periode 2016 – 2020 merupakan tahap dimana indikator sosok usahatannya adalah usahatani dengan system pertanian terpadu, indikator sosok peternaknya adalah peternak pelaku aktivitas *on-farm* serta status ketahanan-kedaulatan pangannya adalah kemandirian pangan nasional menuju kedaulatan pangan nasional dengan sistem pertanian terpadu sudah terbangun.

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas

Beberapa program strategis seperti Peningkatan Produksi, Peningkatan Sarana dan prasarana, Peningkatan Mutu, Pengolahan dan Pemasaran hasil, Peningkatan SDM, serta beberapa program lainnya akan tetap dilaksanakan dan dimantapkan pelaksanaannya, dan disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang ada.

Demikian pula halnya dengan sasaran yang ditetapkan, dimana pada periode 2009 – 2013 ada yang belum dicapai dan belum terealisasi, maka hal tersebut akan dilanjutkan pada periode 2014 – 2019 ini.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Pembangunan peternakan tidak bisa dilepaskan dari Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis suatu wilayah saat ini dan dimasa mendatang. Persoalan yang dialami saat ini adalah, dimana penyusunan Renstra 2014–2019 ini belum seluruhnya bisa mengacu kepada Rencana Pengembangan Kawasan Peternakan yang tercantum dalam Permentan No. 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian, karena masih diperlukan kajian mendalam (study ilmiah) tentang kesesuaian potensi yang ada di Provinsi Riau yang disempurnakan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 830/Kpts/RC.040/12/2016 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional dan Masterplan Kawasan Peternakan Provinsi Riau tahun 2014.

Ancaman krisis pangan saat ini dan ke depan di Indonesia dan bahkan di seluruh belahan bumi akan semakin serius, baik sebagai akibat semakin berkurangnya lahan pertanian, pertumbuhan penduduk dan perubahan iklim global. Dampak perubahan iklim global sangat dirasakan saat ini, dimana kekeringan dan banjir setiap Tahun melanda wilayah Riau dan Indonesia secara keseluruhan. Sejak Tahun 2010 telah terjadi kenaikan suhu yang mencapai 1 derajat celcius dan ada kecendrungan peningkatan setiap tahunnya. Bagi sektor peternakan tentunya sangat berdampak buruk terhadap pertumbuhan dan produksi komoditas ini. Kekeringan dan banjir akan berakibat gagalnya pertanaman, dan akan munculnya gangguan hama dan penyakit pada tanaman dan ternak.

Oleh karena itu harus dipersiapkan program-program khusus untuk mengantisipasi munculnya gejala ini dan adanya tindakan preventif dan kuratif terhadap adanya serangan hama dan penyakit tersebut.

Daerah Riau juga merupakan salah satu Provinsi dengan areal perkebunan yang terluas di Indonesia, dimana saat ini terdapat sekitar 2,6 juta hektar kebun kelapa sawit, yang tentunya hal ini juga menjadi potensi untuk pengembangan peternakan Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit. Dengan demikian diharapkan akan adanya dampak yang signifikan terhadap nilai tambah dan pendapatan masyarakat.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi terhadap permasalahan yang ditemui selama ini dan kajian lingkungan strategis, maka isu-isu strategis pembangunan peternakan di Provinsi Riau, adalah sebagai berikut :

- 1) Perubahan iklim global
- 2) Penurunan kualitas Lingkungan Hidup
- 3) Tingginya Pertumbuhan penduduk
- 4) Lambannya Peningkatan produktivitas
- 5) Kontribusi sektor peternakan terhadap peningkatan pendapatan peternak belum maksimal
- 6) Kapasitas SDM (aparatur, peternak, dan pelaku usaha) belum memadai
- 7) Kondisi Sarana dan Prasarana belum memadai
- 8) Penguasaan teknologi peternakan masih rendah
- 9) Daya saing, produk olahan peternakan serta pemasaran masih terbatas
- 10) Akses peternak terhadap permodalan masih terbatas

Tugas dan fungsi pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau selama dua tahun setelah dijalankannya Renstra 2014 -2019, masih banyak yang belum dapat dicapai. Terutama dalam hal pelaksanaan pembangunan peternakan, seperti produksi telur dan daging.

Permasalahan dan isu-isu yang berkembang maka beberapa program/kegiatan yang telah disusun sebelumnya dalam pembangunan peternakan harus mengalami perubahan dan penajaman fokus kembali (*refocusing*), terutama untuk program/kegiatan pada tahun 2017 dan seterusnya. Sehingga nantinya ada beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya, juga akan mengalami perubahan.

Isu-isu yang berkembang dan sangat kuat pengaruhnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Riau adalah *ketersediaan pangan, infrastruktur, dan maritim*. Isu tentang pangan meliputi luas lahan, irigasi/ rawa/ sumber daya air, pemberdayaan masyarakat, dan pangan alternatif.

Fluktuasi harga daging, khususnya harga daging sapi, masih menjadi permasalahan dalam penyediaan daging. Pada tahun 2016, harga daging sapi mencapai Rp 120.000/kg. Hal ini memerlukan pemikiran lebih lanjut dan perhatian kita semua. Mekanisme harga daging sapi adalah issue nasional yang tidak dapat serta merta diubah oleh Pemerintah Provinsi karena ketersediaan sapi potong bakalan bergerak secara nasional, masing-masing wilayah berebut stok sapi potong dari daerah asal ternak yang sama. Hal yang dapat dilakukan oleh daerah dalam memenuhi kebutuhan sapi potong adalah :

1. Meningkatkan populasi ternak sapi
2. Meningkatkan produktifitas ternak yang telah ada
3. Memenuhi kebutuhan dasar dalam upaya peningkatan produktifitas ternak tersebut yaitu kebutuhan pakan berkualitas, kandang yang sesuai persyaratan kesejahteraan hewan dan pelayanan kesehatan hewan
4. Penggunaan teknologi peternakan untuk mempercepat peningkatan produktifitas ternak dan alternative pendapatan peternak dari peternakan seperti Inseminasi Buatan, tindakan operasi caesar pada hewan besar dalam rangka penyelamatan pedet, pengolahan kompos, pengolahan pupuk cair, pengolahan biogas, pengolahan bioetanol dari ampas kotoran sisa pengolahan biogas
5. Melakukan sosialisasi terus menerus kepada masyarakat peternak baik secara langsung, melalui media massa, media elektronik radio dan televise, media social dan media digital (Koran online atau situs resmi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau)
6. Meningkatkan kapasitas dan jumlah SDM/petugas di lapangan yang langsung melayani masyarakat peternak.
7. Meningkatkan koordinasi dengan instansi lain terkait lalu lintas ternak yaitu Dinas Perhubungan, jajaran TNI AD dan Kepolisian serta stakeholder terkait.

Upaya-upaya tersebut di atas secara riil di lapangan di realisasikan dalam kegiatan-kegiatan antara lain :

1. Pendistribusian ternak sapi ke kelompok ternak di Kabupaten Kota.
2. Penyediaan bantuan sarana dan prasarana budidaya ternak (peralatan transport pakan, perkandangan dll).
3. Pelayanan Inseminasi Buatan dan penyediaan straw (semen beku) oleh UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah Tenayan dan Balai IB Lembang Bandung serta Balai IB Singosari Malang untuk jenis straw lain yang belum diproduksi sendiri berikut kebutuhan N2 cairnya.
4. Intensifikasi kawin alam.
5. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan hewan
6. Peningkatan kapasitas dan jumlah SDM Medik Veteriner dan paramedik Veteriner (Paravet)
7. Restrukturisasi Puskesmas (Pusat Kesehatan Hewan) sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan hewan
8. Pencegahan penyakit menular ternak dan penyediaan obat kuratif yang diprogram khusus menyesuaikan karakteristik penyakit yang ada di Provinsi Riau (masing-masing wilayah di Indonesia memiliki karakteristik penyakit ternak yang berbeda)
9. Monitoring dan evaluasi terus menerus agar diketahui tantangan dan peluang yang ada dalam memajukan bidang peternakan di Provinsi Riau.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Riau, maka telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah yang akan dicapai, yaitu sebagai berikut :

Tabel IV-1 : Tujuan dan Sasaran Pembangunan Peternakan **Jangka Menengah**
Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja/Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Memperkuat Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan	Meningkatnya produksi daging ruminansia	NTP Peternakan				100,50	100,75	101,00
			Angka produksi daging ruminansia lokal (ton)						
			- Sapi				5.248.641	5.353.615	5.460.676
			- Kerbau				1.023.019	1.336.903	1.363.623
		- Kambing				783.136	794.883	806.806	
		Meningkatnya keamanan masyarakat dari ancaman penyakit hewan	Jumlah kasus veteriner pada manusia (orang)				260	234	211

Sesuai dengan sasaran dan tujuan pembangunan yang hendak dicapai, akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Pengembangan ternak sapi potong dilaksanakan melalui program Sistem Integrasi Ternak Tanaman yang ditekankan pada tanaman perkebunan dan tanaman pangan. Pengembangan program pengembangan ternak sapi potong merupakan salah satu pendekatan untuk meningkatkan utilitas lahan dengan pemanfaatan produk samping usaha peternakan sebagai input pada budidaya tanaman dan produk samping tanaman sebagai bahan baku pakan ternak.

Usaha peningkatan produksi ternak harus diikuti dengan penanganan dan pengendalian penyebaran penyakit pada ternak. Untuk itu maka akan dilakukan usaha penurunan penyebaran penyakit dan kejadian penyakit dan melakukan pembebasan serangan penyakit berbahaya. Penyakit yang berbahaya ini digolongkan pada penyakit strategis yaitu Flu burung, antraks, jembrana, parasit darah dan brucellosis.

Pengendalian juga dilakukan pada sektor hilir hingga pengolahan dan pemasaran pangan asal ternak ini. Untuk itu akan didorong para pelaku usaha produk peternak untuk mendapatkan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan produk pangan asal ternak sehingga aman, sehat utuh dan halal (ASUH).

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam menentukan strategi dan arah kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau ke depan berdasarkan tujuan dan sasaran, dikembangkan lebih lanjut pada Tabel V-1.

Tabel V-1 : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Peternakan Tahun 2014-2019

VISI : <i>Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja, serta Pematapan Aparatur</i>			
MISI 7 : Memperkuat pembangunan pertanian dan perkebunan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Memperkuat Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan	Meningkatnya produksi daging ruminansia lokal	Pengembangan kawasan peternakan berbasis sumberdaya lokal secara berkelanjutan	Pengembangan sistem integrasi tanaman dan ternak
		Optimalisasi pemanfaatan cadangan bio-massa pakan ternak	Pengembangan pengolahan pakan ternak
		Optimalisasi produktivitas ternak	Pengembangan Inseminasi Buatan
		Optimalisasi pemanfaatan sumber pembiayaan non-pemerintah	Pengembangan asuransi ternak
	Meningkatnya keamanan masyarakat dari ancaman penyakit hewan	Pencegahan dan pengendalian penularan penyakit menular	peningkatan pelayanan kesehatan hewan
		Pengamanan terhadap ancaman penyakit <i>infectious emerging</i> pada manusia dan hewan	Penerapan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan berbasis <i>one health</i> .
		Restrukturisasi kelembagaan pelayanan kesehatan di wilayah potensial	Peningkatan fungsi puskesmas

One health merupakan konsep untuk mewujudkan kesehatan dunia yang terdiri atas unsur-unsur penciptaan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan dan kesehatan hewan serta keseimbangan lingkungan.

Tabel VI-1 menyebutkan bahwa memperkuat pembangunan peternakan dan kesehatan hewan merupakan bagian dari misi ketujuh Pemerintah Provinsi Riau yaitu Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan. Ukuran dari sasaran pembangunan peternakan dan kesehatan hewan tersebut adalah Nilai tukar petani (NTP) sub sektor peternakan. NTP merupakan indikator makro, yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), namun dijadikan acuan karena ada pengaruh produksi ternak dan pendapatan peternak.

Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut maka peningkatan produksi daging, khususnya dari ternak lokal, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging. Produksi daging dikhususkan pada ternak lokal akan menggambarkan kemampuan peternak untuk memproduksi, sehingga indikator keberhasilannya adalah angka produksi daging ruminasia lokal yang mempengaruhi pendapatan peternak. Penekanan terhadap ternak ruminasia lokal karena saat ini secara nasional penyediaan daging masih menjadi permasalahan nasional, khususnya untuk kebutuhan daging pada hari besar dan penyediaan ternak kurban pada lebaran idul adha.

Pengamanan masyarakat dari ancaman penyakit hewan dimulai dari penyediaan daging yang baik untuk konsumsi, mencegah penyebaran penyakit hewan yang dapat menular kepada manusia (zoonosis) dan menjaga keamanan pangan dari kontaminasi. Fungsi peternakan dan kesehatan hewan merupakan sinergi fungsi produksi, fungsi pengamanan produk pangan asal ternak serta fungsi kesehatan hewan untuk mencegah penyebaran penyakit kepada ternak dan menghindari serangan penyakit hewan kepada manusia.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program Kegiatan, dan indikator kinerja, sasaran kinerja serta pagu pendanaan indikatif revisi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam lima Tahun (periode 2014-2019) disusun berdasarkan evaluasi tahun 2014-2016 serta rencana tahun 2017-2019 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Riau.

Pada Tabel VI-1 digambarkan Indikator Kinerja Program dari SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau yang mengacu pada tujuan dan sasaran.

Tabel VI-1. Indikator Kinerja Program SKPD

PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik (%)
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standart kerja (%)
03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang mendapat teguran/sanksi (%)
04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan selama 12 hari kerja (%)
05	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyampaian laporan capaian kinerja dan keuangan baik dan tepat waktu (%)
		Persentase sistem laporan capaian dan keuangan yang meningkat (%)
06	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah pemotongan ternak ruminansia lokal (ekor)
07	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Menurunkan Angka Kematian Ternak (%)
08	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah populasi ternak sapi (ekor)
09	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Ternak	Jumlah Kelompok Penerima Bantuan yang Mendapatkan Akses Pemasaran (kelompok)

Untuk merinci program yang ada maka dilakukan penjabaran dengan program dan kegiatan untuk kurun waktu 2017-2019 serta pendanaan indikator seperti pada Tabel VI.2, dan untuk melihat perkembangan kegiatan yang sudah dilakukan dari tahun 2014-2016, maka dapat dilihat pada Tabel VI.3.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini akan menerangkan dan menggambarkan bagaimana indikator kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau secara langsung menunjukkan kinerja dalam lima Tahun mendatang (periode 2014-2019) sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Riau.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan Indikator kinerja dari SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Riau.

Tabel VII-1. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

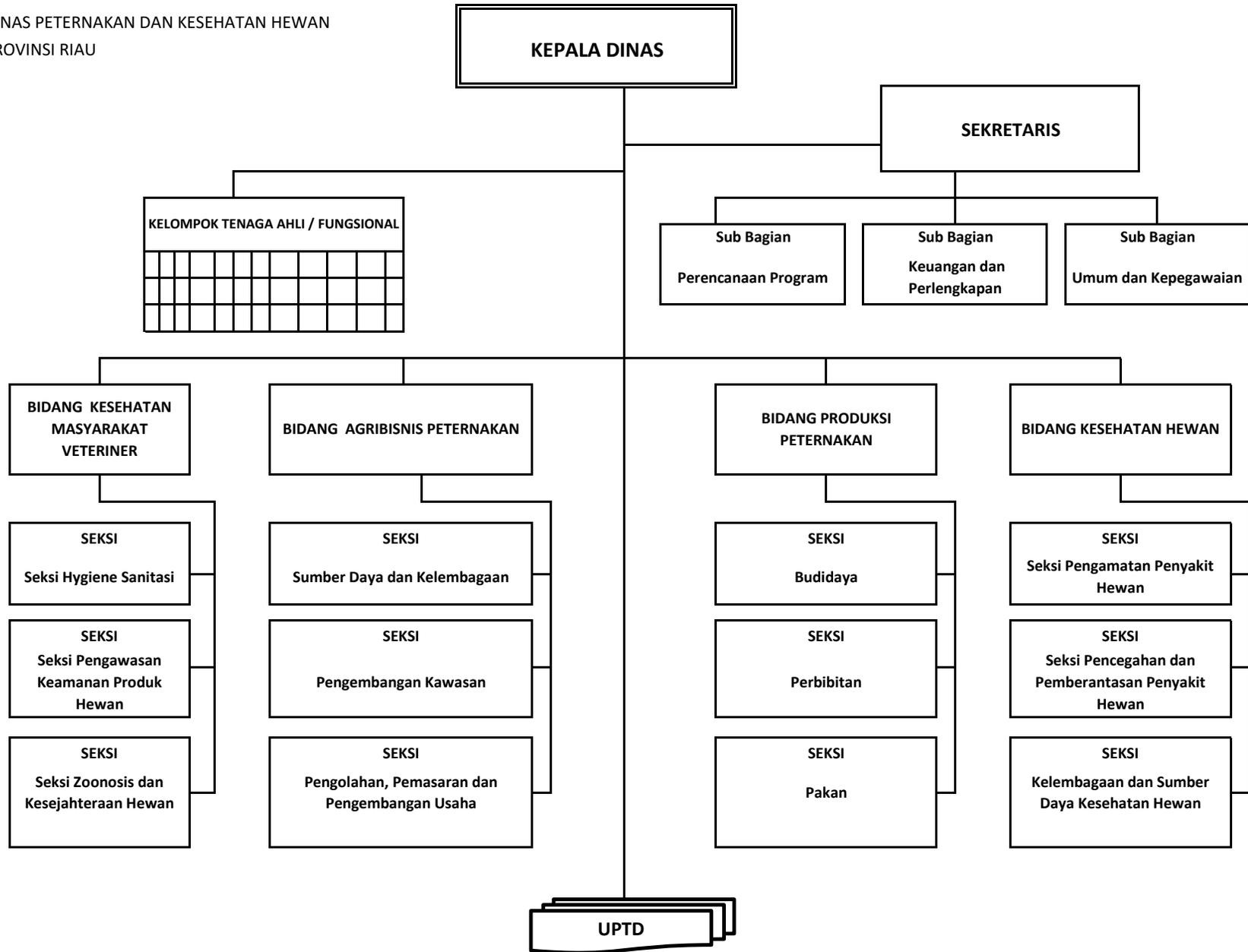
No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Produksi Daging Sapi dan Kerbau (kg)	11.137.293	10.489.942	11.250.074	11.690.190	12.147.567	11.137.293	11.137.293
	- Daging Sapi	9.297.618	8.676.703	9.384.570	9.759.953	10.150.351	9.297.618	9.297.618
	- Daging Kerbau	1.839.675	1.813.239	1.865.504	1.930.238	1.997.217	1.839.675	1.839.675
2	Produksi Daging Unggas (kg)	43.052.452	48.728.950	46.139.904	52.958.452	52.788.832	53.844.609	53.844.609
	- Ayam Buras	3.302.202	3.489.583	4.202.926	5.838.526	4.262.229	4.347.474	4.347.474
	- Ayam ras Pedaging	39.750.250	45.239.366	41.936.978	47.119.926	48.526.603	49.497.135	49.497.135
3	Populasi							-
	- Sapi Potong (ekor)	175.431	194.721	223.921	252.038	262.395	273.308	273.308
	- Sapi Perah (ekor)	266	315	370	-	-	-	-
	- Kerbau (ekor)	32.237	41.436	46.609	52.757	60.067	68.755	68.755
	- Kambing (ekor)	178.460	192.910	204.477	219.241	238.083	262.132	262.132
	- Domba (ekor)	4.720	5.264	5.568	-	-	-	-
	- Babi (ekor)	52.801	57.500	72.732	-	-	-	-
	- Ayam Buras (ekor)	3.170.908	3.350.666	3.366.001	3.381.337	3.396.675	3.412.015	3.412.015
	- Ayam Ras Petelur (ekor)	146.430	166.749	170.074	-	-	-	-
	- Ayam Ras Daging (ekor)	36.971.746	39.308.628	41.026.046	42.743.464	44.460.881	46.178.299	46.178.299
	- Itik (ekor)	249.579	271.257	440.506	-	-	-	-
4	NTP Peternakan	102,12	103,14	104,17	105,22	100,50	100,75	101,00

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau ini merupakan bagian dari upaya untuk mensinkronkan sasaran kinerja daerah. Dengan adanya perubahan Renstra ini diharapkan mampu menjembatani sasaran kinerja daerah dengan kegiatan yang dilaksanakan di OPD.



BAGAN ORGANISASI
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU



TABEL VI.2. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja Penanggung Jawab
						Target (17)	Rp (18)	Target (17)	Rp (18)	Target (15)	Rp (16)	Target (17)	Rp (18)	Target (17)	Rp (18)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)												
1				I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	-	-	-	-	90	2,162.10	100	2,505.00	100	2,505.00	100.00	
				1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	5,000.00	11.50	5,000.00	11.00	5,000.00	12.10	15,000.00	
				2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah rekening	-	-	-	-	4.00	450.00	4.00	450.00	4.00	435.00	12.00	
				3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	-	-	-	-	13.00	13.00	13.00	100.00	13.00	110.00	39.00	
				4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga operator SIKPD	-	-	-	-	2.00	50.00	2.00	59.00	2.00	64.40	6.00	
				5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan dan operasionalnya	-	-	-	-	8.00	250.00	8.00	300.00	8.00	330.00	24.00	
				6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan (jenis)	-	-	-	-	32.00	75.00	32.00	80.00	32.00	88.00	96.00	
				7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yang disediakan (jenis)	-	-	-	-	22.00	75.00	22.00	80.00	22.00	88.00	66.00	
				8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang disediakan (jenis)	-	-	-	-	22.00	35.00	22.00	50.00	22.00	55.00	66.00	
				9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah eksemplar media massa	-	-	-	-	25.00	35.00	25.00	50.00	25.00	55.00	75.00	
				10 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan Minuman (porsi)	-	-	-	-	115.00	125.00	115.00	125.00	120.00	137.50	350.00	
				11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah ASN yang meakukan perjalanan dinas (orang)	-	-	-	-	90.00	700.00	90.00	900.00	90.00	800.00	270.00	
				12 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor (orang)	-	-	-	-	7.00	201.60	7.00	300.00	7.00	330.00	21.00	
				13 Pameran Pembangunan (Riau Expo)	Keikutsertaa pada Riau Ekspo (kali)	-	-	-	-	1.00	141.00	-	-	-	-	1.00	
2				II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja	-	-	-	-	88.00	1,290.55	100.00	1,025.00	100.00	871.25	100.00	
				1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor (unit)	-	-	-	-	44.00	370.55	40.00	200.00	40.00	300.00	124.00	
				2 Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan operasional (unit)	-	-	-	-	6.00	120.00	6.00	100.00	6.00	75.00	18.00	
				7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan Gedung Kantor yang dioelhara (unit)	-	-	-	-	58.00	50.00	75.00	50.00	75.00	118.25	208.00	
				9 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				10 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab (unit)	-	-	-	-	1.00	750.00	1.00	675.00	1.00	150.00	3.00	
				11 Pengamanan dan Penertiban Barang Milik Daerah Pemerintah	Jumlah barang yang diamankan dan tertibkan (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	34.00	78.00	34.00	
				12 Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah barang diinventarisir dan dinilai (unit)	-	-	-	-	-	-	18.00	-	18.00	150.00	36.00	
3				III Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur	-	-	-	-	96.00	162.15	100.00	138.20	100.00	117.47	100.00	
				1 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Jumlah pelaksanaan senam dan ceramah agama (kali)	-	-	-	-	74.00	52.00	74.00	52.20	74.00	50.00	222.00	
				2 Pengadaan Pakaian Dinas dan Perengkapannya	Jumlah Pegawai yang memperoleh PDH (orang)	-	-	-	-	190.00	110.15	190.00	86.00	190.00	67.47	570.00	
				3 Pengadaan Pakaian Melayu dan Perengkapannya	Jumlah Pegawai yang memperoleh pakaian melayu (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja Penanggung Jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						(17)	(18)	(17)	(18)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)	(18)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	-	-	-	-	93.00	200.00	100.00	202.92	100.00	172.48	100.00	(21)
4				IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara	-	-	-	-	93.00	200.00	100.00	202.92	100.00	172.48	100.00	
				1 Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang dilatih (orang)	-	-	-	-	66.00	200.00	66.00	202.92	66.00	172.48	198.00	
				2 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi (kali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				3 Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	Jumlah JFT yang dinilai (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				4 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Jumlah ASN yang dilatih (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5				V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan penyampaian laporan	-	-	-	-	94.00	714.00	-	-	100.00	-	100.00	
				1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen ikhtisar realisasi kinema (dokumen)	-	-	-	-	1.00	50.00	-	-	1.00	-	2.00	
				2 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Jumlah Dokumen LAKIP	-	-	-	-	1.00	50.00	-	-	1.00	-	2.00	
				3 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	-	-	-	-	1.00	50.00	-	-	1.00	-	2.00	
				4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				5 Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah laporan	-	-	-	-	4.00	50.00	-	-	4.00	-	8.00	
				6 Rapat Koordinasi pada setiap SKPD	Terlaksananya Rapat koordinasi pada setiap SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				7 Supervisi dan Statistik	Laporan validasi data statistik peternakan (laporan)	-	-	-	-	1.00	264.00	-	-	1.00	-	2.00	
				8 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Laporan money kegiatan (laporan)	-	-	-	-	1.00	250.00	-	-	1.00	-	2.00	
6	Meningkatkan skala usaha budidaya peternakan	Meningkatnya pemilihan ternak tingkat rumah tangga	Jumlah peternak yang memelihara sapi minimal 5 ekor (peternak)	VI Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	107	3,092	100	1,385	102	1,350	103	1,042	103	1,042	1,060.11	
				1 Pengembangan Kelembagaan Agribisnis Peternakan (SMD)	Jumlah Peserta yang Mengikuti Fasilitas Kelembagaan SMD	70	367	90	385	-	-	-	-	-	-	210.00	
					Jumlah SMD (orang)	-	-	-	-	47.00	350.00	47.00	500.00	47.00	550.10	141.00	
				2 Peningkatan Pemanfaatan Limbah Ternak Sapi	Tersedianya Unit Pengolahan Limbah Cair Ternak dan Rumah Kompos (Unit)	30	2,625	10	1,000	-	-	-	-	-	-	40.00	
					Jumlah Pengolahan Limbah Ternak (kelompok)	-	-	-	-	15.00	1,000.00	15.00	542.10	15.00	492.00	45.00	
				3 Pengadaan Ternak Sapi Untuk Kelompok Tani	Bertambahnya ternak sapi pada kelompok ternak (Ekor)	7	100	-	-	-	-	-	-	-	-	7.00	
				4 Pengembangan Agribisnis Peternakan (SITT)	Penyebaran Ternak Sapi Secara Terintegrasi di Perkebunan Rakyat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	495.00	
7	Meningkatkan status kesehatan hewan dan jaminan pangan asal hewan ASUH	Menurunnya ancaman penyakit hewan strategis	Angka penurunan prevalensi penyakit hewan menular strategis (kasus)	VII Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase angka kematian ternak	85	9,656	89	20,276	8.00	9,150	5.00	8,981	5.00	8,982	272.00	
				1 Pendataan masalah peternakan	Data statistik peternakan dan buku database (Laporan)	2	420	2	441	-	-	-	-	-	-	6.00	
					Jumlah Dokumen statistik peternakan (dokumen)	-	-	-	-	2.00	300.00	2.00	551.00	2.00	750	6.00	
				2 Pengadaan Obat Hewan	Penyediaan obat hewan, vaksin dan pengawasan obat (Paket)	1	1333	1	1600	-	-	-	-	-	-	3.00	
					Jumlah obat hewan dan vaksin (dosis)	-	-	-	-	55,000.00	2,000.00	55,000.00	680.27	55,000.00	748.30	165,000.00	
				3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium UPT. LVKH	Mencapai ISO 17025 (Laboratorium Veteriner) pada Tahun 2017 (Jumlah Laboratorium)	-	1,890	1	1,984	-	-	-	-	-	-	1.00	
					Jumlah sarana dan prasarana Laboratorium UPT. LVKH (paket)	-	-	-	-	1.00	2,000.00	1.00	750.00	1.00	763.27	3.00	
				4 Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Terlaksananya pencegahan dan pengendalian penyakit hewan (Laporan)	14,400	1,455	16,800	1,601	-	-	-	-	-	-	31,200.00	
					Jumlah penanganan ternak sakit (ekor)	-	-	-	-	4,308.00	1,000.00	4,308.00	750.00	4,308.00	700.00	12,924.00	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja Penanggung Jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
						(17)	(18)	(17)	(18)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)	(18)	(19)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)												(21)
				5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring dan evaluasi PHMSZ (laporan)	3	448	12	538	-	-	-	-	-	-	15.00
						Jumlah laporan money keswan (laporan)	-	-	-	-	12.00	300.00	12.00	700.00	12.00	650.00	36.00
				6	Penanggulangan Rabies dan SE	Vaksin rabies (Dosis)	7,500	540	8,000	648	-	-	-	-	-	-	22,700.00
						Operasional kegiatan Kontrol Populasi HPR (Ekor)	1,700	-	1,750	-	-	-	-	-	-	-	5,100.00
						Jumlah penanganan kasus dan SE (kasus)	-	-	-	-	32.00	300.00	32.00	600.00	32.00	600.00	96.00
				7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Puskesmas	Jumlah paket pelayanan kesehatan hewan di puskesmas untuk kabupaten dan kota (Paket)	3	936	3	1123	-	-	-	-	-	-	9.00
						Jumlah tenaga medis (orang)	-	-	-	-	60.00	1,000.00	60.00	750.00	60.00	800.00	180.00
				8	Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan (Lab. Keswan UPT. LVKH)	Jumlah Hewan yang Ditangani (Ekor)	950	299	1,000	314	-	-	-	-	-	-	2,950.00
						Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan Asal Hewan (Lab. Kesmavet UPT. LVKH)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
						Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan (Klinik UPT LVKH)	-	-	-	-	1,100.00	550.00	1,100.00	1,500.00	1,100.00	1,200.00	3,300.00
				9	Pengamatan Penyidikan Penyakit Hewan dan Pengamanan Produk Asal Hewan (PAH) UPT. LVKH	Jumlah Spesimen Hewan dan Sampel PAH (Spesimen)	17,500	1,155	18,000	1,211	-	-	-	-	-	-	35,500.00
						Jumlah spesimen hewan dan sampel produk asal hewan	-	-	-	-	18,000.00	1,000.00	18,000.00	1,000.00	18,000.00	1,000.00	54,000.00
				10	Penanggulangan Gangguan dan Penyakit Reproduksi Asal Hewan	Terlaksananya penanggulangan gangguan dan penyakit reproduksi asal hewan (unit)	13	680	13	816	-	-	-	-	-	-	39.00
						Jumlah penanganan kasus Gangguan Reproduksi (kasus)	-	-	-	-	1,862.00	700.00	2,000.00	700.00	2,000.00	770.00	5,862.00
				11	Pengawasan Hygiene Sanitasi Produk Asal Hewan	Persentase Penurunan Tingkat Cemaran Mikroba (%)	-	-	-	-	-	-	68.00	1,000.00	65.00	1,000.00	133.00
				12	Pembangunan Rumah Sakit Hewan	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan Rumah Sakit Hewan di Provinsi Riau (Paket)	-	-	1	10,000	-	-	-	-	-	-	1.00
						- DED RSH (Paket)	1	500	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00
						Tersedianya dokumen TVS, Amdal dan DED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				13	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Flu Burung (AI)	Jumlah Petugas Pelayanan Veteriner (PPV) yang memperoleh operasional pengendalian penyakit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00
				14	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyakit Hewan Menular strategis	Rapat koordinasi PHMSZ se Provinsi (kali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00
				15	Studi Kelayakan Rumah Sakit Hewan	Tersedianya data dukung pembangunan Rumah Sakit Hewan Provinsi Riau (Dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja Penanggung Jawab
						Target (17)	Rp (18)	Target (17)	Rp (18)	Target (15)	Rp (16)	Target (17)	Rp (18)	Target (17)	Rp (18)	Target (19)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	10,456,531	68,186	11,294,246	70,159	12,219	45,893	13,211	47,180	14,532	47,180	31,620,090.77	(21)
8	Meningkatkan ketersediaan pangan asal ternak	Meningkatnya produksi daging ruminansia	Angka Produksi daging ruminansia lokal (ton)	VIII Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah produksi daging (Kg)												
				1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perbibitan Ternak (UPT PTU Salo)	Tersedianya sarana dan prasarana UPT Pembibitan Ternak dan Pengembangan Pakan Ternak (paket)	1	6,575	1	2,797	-	-	-	-	-	3.00	
						Jumlah sarana dan prasarana UPT Pembibitan Ternak dan Pengembangan Pakan Ternak (paket)	-	-	-	-	36.00	1,347.00	10.00	9,415.49	10.00	10,000.00	56.00
				2	Pengembangan Produksi Semen Beku	Jumlah Straw dan Operasional UPT. BIBD (Straw)	70,000	1,600	80,000	1,700	-	-	-	-	-	200,000.00	
						Jumlah Straw yang didistribusikan (Straw)	-	-	-	-	40,000.00	1,630.00	40,000.00	1,630.00	40,000.00	1,300.00	120,000.00
				3	Monitoring dan Evaluasi Straw BIBD	Calving Rate (%)	60	570	65	650	-	-	-	-	-	-	180.00
						Angka kebuntingan dari straw UPT IBID (%)	-	-	-	-	60.00	600.00	65.00	250.00	70.00	325.49	195.00
				4	Pendamping Teknis Ternak yang Didistribusikan Kepada Masyarakat	Jumlah pendamping teknis ternak yang didistribusikan (orang)	-	-	-	-	75.00	1,200.00	75.00	1,200.00	75.00	1,200.00	225.00
				5	Pengembangan Inseminasi Buatan (IB)	Peningkatan Angka Kelahiran Ternak (Akseptor)	18,000	750	19,800	975	-	-	-	-	-	-	52,800.00
						Jumlah Kelahiran Ternak hasil IB (ekor)	-	-	-	-	20,000.00	800.00	23,000.00	1,250.00	30,000.00	1,000.00	73,000.00
				6	Pembibitan dan Perawatan Ternak (UPT PTU Salo)	Operasional Pembibitan dan Perawatan ternak (Paket)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00
						Pemeliharaan dan Perawatan Ternak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Jumlah bibit ternak (ekor)	1	700	1	750	375.00	1,000.00	400.00	2,000.00	450.00	2,200.00	1,227.00
				7	Pembangunan Areal Peternakan di Kabupaten Kampar	Tersedianya sarana dan prasarana di areal peternakan di kabupaten kampar (paket)	1	7,500	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00
						Jumlah sarana dan prasarana di areal peternakan di kabupaten kampar (paket)	-	-	-	-	32.00	10,400.88	-	-	-	-	32.00
				8	Pengembangan dan Penyediaan Pakan Ternak UPT	Jumlah Pakan Ternak (Konsentrat) (Ton)	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-	400.00
						Bibit legum (polibag)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Bibit Rumput (stek)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Perluasan Kebun HMT (Ha)	-	-	5	800	20.00	1,000.00	-	-	-	-	25.00
				9	Peningkatan Sarana dan Prasarana Peternakan	Tersedianya Sarana Prasarana IB, N2 Cair, Semen Beku	-	2,467	-	3,818	-	-	-	-	-	-	-
						- N2 Cair (liter)	35,000	560	40,000	640	-	-	-	-	-	-	105,000.00
						- Straw (dosis)	40,000	480	50,000	700	-	-	-	-	-	-	126,000.00
						- Kontainer (Unit)	48	1,200	60	1,560	-	-	-	-	-	-	125.00
						- AI Kit (Unit)	48	336	36	270	-	-	-	-	-	-	96.00
						- Mesin Tetas (Unit)	48	168	96	384	-	-	-	-	-	-	144.00
						- Hormonal (Dosis)	1,000	200	1,200	264	-	-	-	-	-	-	8,600.00
						Jumlah Sarana Prasarana IB (unit)	-	-	-	-	25,000.00	1,500.00	25,000.00	1,500.00	25,000.00	1,500.00	75,000.00
				10	Peningkatan Pemanfaatan Sumber Pakan Lokal	Tersedianya Alat Pengolah Pakan Ternak/Chopper (Unit)	90	4,500	100	5,000	-	-	-	-	-	-	270.00
						Unit Pengolahan Pakan Skala Kecil Ruminansia (Paket)	5	1,500	7	2,000	-	-	-	-	-	-	15.00
						Jumlah Alat Pengolah Pakan Ternak/Chopper (Unit)	-	-	-	-	30.00	2,500.00	10.00	600.00	10.00	600.00	50.00

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja Penanggung Jawab
						Target (17)	Rp (18)	Target (17)	Rp (18)	Target (15)	Rp (16)	Target (17)	Rp (18)	Target (17)	Rp (18)	Target (19)	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
				Pengembangan Lumbung Pakan	Jumlah Kelompok yang mengembangkan LP (kelompok)	-	-	-	-	-	-	5.00	1,500.00	5.00	1,500.00	10.00	
				11. Pembangunan Sarana dan Prasarana Peternakan Inseminasi Buatan	Tersedianya sarana dan prasarana UPT IB dalam Mencapai ISO 9001	1	-	1	1,200	-	-	-	-	-	-	3.00	
					Jumlah sarana dan prasarana UPT IB dalam Mencapai ISO 9001 (unit)	-	-	-	-	10.00	2,500.00	6.00	2,500.00	6.00	1,500.00	22.00	
				12. Pengembangan Agribisnis Peternakan	Penyebaran Ternak Sapi Secara Terintegrasi di Perkebunan Rakyat (Ekor)	396	5,418	728	10,882	-	-	-	-	-	-	1,124.00	
					Jumlah Ternak Sapi model integrasi (Ekor)	-	-	-	-	384.00	4,000.00	1,400.00	14,300.00	1,200.00	15,000.00	2,984.00	
				13. Pendistribusian Bibit Ternak Sapi Kepada Masyarakat	Tersebar nya ternak sapi pada masyarakat di 12 Kab/Kota (Ekor)	957	11,100	363	4,200	-	-	-	-	-	-	1,870.00	
					Jumlah Ternak Sapi (Ekor)	-	-	-	-	333.00	4,000.00	225.00	2,284.44	190.00	2,000.00	748.00	
				14. Pengembangan Usaha Sapi Potong	Tersebar nya bibit ternak sapi potong pada kelompok ternak di 12 kabupaten/kota (Ekor)	990	11,000	1,188	15,165	-	-	-	-	-	-	5,891.00	
					Jumlah Ternak Sapi (Ekor)	-	-	-	-	656.00	7,000.00	-	-	-	-	656.00	
				15. Pengembangan Budidaya Ternak Ruminansia	Pembinaan Kelompok Tani Ternak Ruminansia (Kelompok)	60	600	80	744	-	-	-	-	-	-	140.00	
					Jumlah Kelompok Ternak Ruminansia (Kelompok)	-	-	-	-	40.00	750.00	50.00	500.00	55.00	550.00	145.00	
				16. Pengembangan Budidaya Ternak Non Ruminansia	Pembinaan Kelompok Tani Ternak Non Ruminansia (Kelompok)	50	367	30	510	-	-	-	-	-	-	105.00	
					Jumlah Kelompok Ternak non Ruminansia (Kelompok)	-	-	-	-	20.00	400.00	30.00	500.00	35.00	550.00	85.00	
				17. Identifikasi Lokasi dan Kelompok Penyebaran Ternak Peternakan	Jumlah kelompok yang diidentifikasi (Kelompok)	-	-	-	-	150.00	350.00	150.00	500.00	150.00	550.00	450.00	
				18. Pendistribusian Ternak Kerbau	Tersebar nya ternak kerbau pada kelompok ternak (Ekor)	19	315	42	330	-	-	-	-	-	-	1,051.00	
					jumlah ternak kerbau (Ekor)	-	-	-	-	20.00	420.00	80.00	2,500.00	85.00	2,750.00	185.00	
				19. Pengadaan Ternak Kambing dan Fasilitas Pendukung	Terdistribusinya Ternak Kambing dan Bahan kandang pada kelompok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,248.00	
					Jumlah ternak kambing (ekor)	-	-	-	-	240.00	600.00	500.00	1,500.00	600.00	1,500.00	1,340.00	
				20. Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Laporan Monev Perkembangan Pembangunan Peternakan (Laporan)	4	787	4	826	-	-	-	-	-	-	12.00	
					Jumlah Laporan Monev Perkembangan Pembangunan Peternakan (Laporan)	-	-	-	-	3.00	700.00	3.00	1,000.00	3.00	1,000.00	9.00	
				21. Pemutakhiran Data Teknis Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Data (Dokumen)	1	367	1	385	1.00	495.56	1.00	650.00	1.00	715.00	6.00	
				22. Peningkatan Kelembagaan Peternak dan Kelompok Peternakan	Meningkatnya SDM Peternak (Orang)	200	315	880	2,500	-	-	-	-	-	-	1,200.00	
					Jumlah Peternak yang dilatih (Orang)	-	-	-	-	945.00	700.00	945.00	400.00	945.00	440.00	2,835.00	
				23. Pengembangan Kawasan Peternakan	Jumlah Kelompok Tani Ternak yang dibina (Kelompok)	-	-	8	2,000	-	-	-	-	-	-	8.00	
					Jumlah SPR yang dibina	-	-	-	-	10.00	2,000.00	10.00	1,200.00	10.00	1,000.00	30.00	
				24. Pengadaan Bibit Ternak Untuk Areal Peternakan di Kabupaten Kampar	Jumlah Ternak yang Dipelihara (Ekor)	250	2,500	100	1,600	-	-	-	-	-	-	600.00	
				25. Pengembangan Bibit Ternak Sapi Lokal	Terlaksananya pengembangan bibit ternak sapi lokal yang berSKLB (ekor)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja Penanggung Jawab	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
						(17)	(18)	(17)	(18)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)	(18)	(19)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)												(21)	
				26	Pengembangan Sumber Daya Pakan Ternak Ruminansia	Jumlah penyedia pakan ternak (kelompok)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				27	Pembangunan kandang ternak Bull UPT IBD	Penyediaan bangunan kandang ternak dan fasilitas pendukungnya (paket)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00
				28	Pengadaan Mesin Tetas Ayam Kampung dan Itik	Tersedianya mesin tetas ayam kampung dan itik di Kota Pekanbaru, Kab. Inhil, Kampar &	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.00
				29	Pengadaan Mesin Pencacah Makanan Ternak Sapi	Tersedianya Mesin Pencacah Makanan Ternak Sapi (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00
				30	Identifikasi Lokasi dan Kelompok Penyebaran Ternak Peternakan	data lokasi dan kelompok calon penerima bantuan (APBN/APBD) (Kelompok)	140	420	150	400	-	-	-	-	-	-	-	410.00
				31	Pendistribusian Ternak Bebek	Tersebar nya ternak bebek pada kelompok ternak (Ekor)	700	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,300.00
				32	Pendistribusian Ternak Ayam	Tersebar nya ternak ayam pada kelompok ternak (Ekor)	1,000	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253,000.00
				33	Pendistribusian ternak burung puyuh	Terdistribusinya ternak burung puyuh di Kota Pekanbaru dan Kab. Kampar (ekor)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000.00
				34	Pengadaan Bibit Ayam dan pakan Ayam Kelompok Tani Ayam Potong	Tersebar nya ternak ayam pada kelompok ternak di kab/kota (Ekor)	250	2,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
				35	Peningkatan Sumber Daya Perbibitan Pedesaan	Meningkatnya kelompok perbibitan ternak di pedesaan (kelompok)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				36	Peningkatan Kapasitas SDM UPT PT & P2T	Meningkatnya kapasitas SDM UPT PT & P2T (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				37	Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan Kepada Masyarakat	Jumlah kelompok (kelompok)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
				38	Temu Tugas Pendamping Teknis Peternakan	Jumlah Petugas Pendamping (orang)	75	472	92	496	-	-	-	-	-	-	-	241.00
				39	Pendampingan Teknis Ternak yang Didistribusikan Pada Masyarakat	Jumlah Petugas Pendamping (orang)	75	1,307	92	1,372	-	-	-	-	-	-	-	167.00
				40	Pendamping Teknis Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan Kepada	jumlah kelompok (kelompok)	10	194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00
				41	Pengembangan Teknologi Pakan Ternak Kepada Masyarakat	jumlah kelompok (kelompok)	-	-	4	400	-	-	-	-	-	-	-	4.00
				42	Pengembangan Kawasan Terpadu Pertanian dan Peternakan	Jumlah kawasan yang dikembangkan (Kab/Kota)	-	-	4	4,000	-	-	-	-	-	-	-	4.00
				43	Masterplan Pengembangan Kawasan Peternakan	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan kawasan peternakan di Provinsi Riau yang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00
				44	Identifikasi Potensi hijauan pakan ternak (HPT)	tersedianya data inventarisasi pakan ternak (laporan)	12	420	12	441	-	-	-	-	-	-	-	24.00

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja Penanggung Jawab
						Target (17)	Rp (18)	Target (17)	Rp (18)	Target (15)	Rp (16)	Target (17)	Rp (18)	Target (17)	Rp (18)	Target (19)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)												(21)
				45	Visualisasi Pengembangan Sistem Integrasi Ternak dengan Tanamaan (SITT)	Tersedianya visualisasi Sistem Integrasi Ternak dengan Tanamaan/SITT (paket)	1	200			-	-	-	-	-	-	1.00
				46	Penguatan Permodalan Kelompok Usaha Peternakan	Jumlah kelompok usaha peternakan (kelompok)	8	588	10	400	-	-	-	-	-	-	18.00
9	Meningkatkan skala usaha budidaya peternakan	Meningkatnya pemilikan ternak tingkat rumah tangga	Jumlah peternak yang memelihara sapi minimal 5 ekor (peternak)	IX	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Ternak	Jumlah Kelompok yang Mendapatkan Akses Pemasaran (kelompok)		3,110	64	3,414	35.00	3,150	40.00	1,165	44.00	1,165	183.00
				1	Pengawasan Hygiene Sanitasi Produk Asal Hewan	Persentase Penurunan Tingkat Cemaran Mikroba (%)	80	720	75	864	70.00	750.00	-	-	-	-	310.00
				2	Pengadaan sarana dan prasarana UPT Plaza ternak	Tersedianya sarana dan prasarana UPT Plaza Ternak (unit)	1	-	1	1,000	-	-	-	-	-	-	3.00
						Jumlah sarana dan prasarana UPT Plaza Ternak (unit)	-	-	-	-	3.00	1,200.00					3.00
				3	Peningkatan sarana dan prasarana UPT Plaza ternak	Jumlah sarana dan prasarana UPT Plaza Ternak (unit)	-	-	-	-	-	-	1.00	165.29	1.00	150.00	2.00
				4	Peningkatan Pelayanan UPT Plaza ternak	Meningkatnya pelayanan dan retribusi di UPT Plaza ternak (%)	-	-	30	450	-	-	-	-	-	-	30.00
						Jumlah petugas UPT Plaza ternak (orang)	-	-	-	-	35.00	350.00	35.00	150.00	35.00	165.29	105.00
				5	Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan	Termanfaatkan Sarana dan Prasarana Plaza Ternak (Paket)	1	750	1	800	-	-	-	-	-	-	3.00
						Jumlah Sarana dan Prasarana Plaza Ternak yang dipelihara (Paket)	-	-	-	-	1.00	850.00	-	-	-	-	1.00
				6	Pameran Pembangunan (Riau Expo)	Keikutsertaa pada Riau Ekspo (kali)	-	-	-	-	-	-	1.00	150.00	1.00	100.00	2.00
				7	Fasilitasi Permodalan Kelompok Usaha Peternakan	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh permodalan (orang)	-	-	-	-	-	-	50.00	200.00	60.00	200.00	110.00
				8	Pembinaan manajemen dan kemitraan usaha peternakan	Jumlah pelaku usaha (orang)	-	-	-	-	-	-	50.00	150.00	60.00	300.00	110.00
				9	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan dan pemasaran hasil Peternakan	Jumlah kelompok yang memperoleh fasilitasi sarana dan prasarana (kelompok)	-	-	-	-	-	-	30.00	350.00	40.00	250.00	70.00
				10	Renovasi Rumah Kompos Plaza Ternak	Termanfaatkan Rumah Kompos Plaza Ternak (Unit)	1	150	1	200	-	-	-	-	-	-	2.00
				11	Outlet Informasi Pasar (Audio Visual Plaza Ternak)	Tersedianya Outlet Informasi Harga Pasar (Ternak, Hasil Ternak dan Pakan Ternak) (Unit)	1	175	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00
				112	Bantuan Lima Buah Mesin Pencabut Bulu Ayam dan 100 Keranjang Ayam Untuk	Tersedianya bantuan lima buah mesin pencabut bulu ayam dan 100 keranjang ayam untuk kelompok	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
				13	Revitalisasi RPH Mini Plaza Ternak	Termanfaatkan RPH Mini Plaza Ternak (Unit)	1	175	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00
				14	Fasilitasi temu bisnis peternakan di plaza ternak	Tersedianya temu bisnis peternakan (kali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				15	Pelatihan Pengolahan Madu Alam untuk Petani Madu	Meningkatnya wawasan dan keterampilan usaha ternak madu (orang)	12	200	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00
				16	Peningkatan SDM di Plaza Ternak (Pembina dan Pelaku Usaha)	Tersedia SDM yang Profesional di Plaza Ternak (orang)	-	-	45	100	-	-	-	-	-	-	45.00
				17	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	Terfasilitasinya promosi hasil produksi unggulan daerah (event)	8	840	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
				18	Visualisasi Potensi dan Pengembangan Peternakan Sapi Riau pada Media	Terselenggaranya informasi potensi dan pengembangan ternak Provinsi Riau melalui media	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00
				19	Visualisasi Pengembangan Sistem Integrasi Ternak dengan Tanamaan (SITT)	Terselenggaranya Informasi Sistem Integrasi Ternak dengan Tanamaan (SITT) Dinas Peternakan Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00
				JUMLAH							64,072.24	62,239.71	62,035.65				